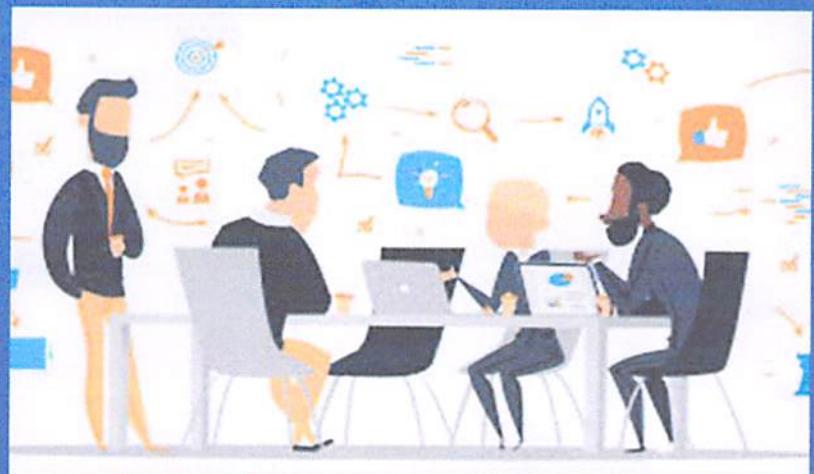




LAPORAN KINERJA TAHUN 2022

BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT



KATA PENGANTAR

Segenap puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, karena dapat diselesaikannya Penyusunan Laporan Kinerja Biro Administrasi Pembangunan Tahun 2022. Kinerja pemerintahan baik pada level daerah Kabupaten/Kota, Provinsi maupun pada skala nasional saat ini dihadapkan suatu kondisi yang harus dicapai, yaitu menerapkan paradigma baru pemerintahan menuju kepemerintahan yang baik, yang di dalamnya mencakup akuntabilitas, transparansi, penegakan hukum, tanggap, orientasi terhadap konsensus, partisipatif, efektifitas, efisien dan visi strategis yang kesemuanya ditujukan kepada kesejahteraan masyarakat.

Laporan Kinerja Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 disusun dan disampaikan sebagai pelaksanaan kewajiban Biro untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam DPA/DPPA Biro. Laporan Kinerja juga bertujuan untuk mencapai visi dan misi organisasi secara terukur dengan sasaran strategis atau target kinerja sebagaimana telah di tetapkan dalam Perjanjian Kinerja Biro Administrasi Pembangunan Tahun 2022. Adapun yang menjadi dasar penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2022 adalah Perjanjian Kinerja Perubahan Biro Administrasi Pembangunan tahun 2022. Selain itu penyusunan Laporan Kinerja merupakan sebagai pelaksanaan dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Gubernur Sumatera barat Nomor 65 Tahun 2012 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Sepenuhnya kami menyadari, bahwa kualitas laporan ini belum sesuai dengan yang diharapkan hal ini disebabkan oleh adanya faktor internal dan eksternal. Faktor internal antara lain kurangnya jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang tersedia dalam melaksanakan program dan kegiatan serta komitmen seluruh pegawai Biro dalam mengimplementasikan prinsip akuntabel

dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Faktor eksternal yang bersifat sebagai fungsi kontrol untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai target indikator kinerja yang telah ditetapkan oleh Biro. Selain itu target indikator kinerja yang ditentukan oleh Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, untuk itu Biro Administrasi Pembangunan selalu berupaya melakukan perbaikan secara terencana, konsisten dan berkelanjutan.

Hasil dari penulisan laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada seluruh bagian di lingkungan Biro tentang aspek-aspek yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggungjawab masing-masing serta sejauhmana capaian kinerja dapat diwujudkan pada tahun 2022 dan menjadi acuan dimasa mendatang untuk mewujudkan peningkatan kinerja.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih banyak kekurangan meskipun demikian kami telah berusaha menyajikan laporan ini sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.

Padang, 16 Januari 2023

KEPALA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN


H E F D I, SH M.Si
Pembina Utama Muda,
NIP. 19640915 199003 1 007

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sebagai bagian komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pelaporan kinerja pemerintah menjadi salah satu aspek penting untuk mendorong pemerintah yang transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Hal ini merupakan bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran sekaligus merupakan gambaran dari pelaksanaan suatu program/kegiatan dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan dan sasaran organisasi.

Memenuhi maksud tersebut diatas Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat telah melakukan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2022 yang merupakan penerapan tahun kedua dari Renstra Biro Administrasi Pembangunan Tahun 2021-2026. Laporan Kinerja ini disusun untuk mewujudkan kewajiban Biro guna mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi, misi Biro dalam mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Administrasi Pembangunan sesuai dengan Perjanjian Kinerja Biro Tahun 2022 menunjukan keberhasilan dalam pelaksanaan sasaran strategis yang menjadi target pelaksanaan kegiatan
2. Pencapaian 3 (tiga) sasaran strategis Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 yang diukur berdasarkan rata-rata capaian kinerja terhadap 3 (tiga) indikator kinerja dengan hasil capaian kinerja sebesar 106,66%
3. Pencapaian sasaran strategis 1 (satu) Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 yang diukur berdasarkan rata-rata capaian kinerja terhadap indikator kinerja yaitu ***Persentase Perangkata Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota Yang tertib Administrasi Pelaksanaan Pembangunan*** dengan rata-rata capaian indikator kinerja sebesar 106,66% yang rinciannya terdiri dari Persentase Perangkat Daerah (OPD Provinsi) yang tertib administrasi pelaksanaan

pembangunan capaian kinerjanya sebesar 107,98%. Persentase Pemerintah Kabupen/Kota yang tertib administrasi pelaksanaan pembangunan capaian kinerjanya sebesarnya 109,89%.

4. Usaha yang dilakukan dalam rangka dalam rangka mewujudkan indikator kinerja terhadap ***Persentase Perangkata Daerah Yang tertib Administrasi Pelaksanaan Pembangunan*** adalah dengan menerapkan penggunaan aplikasi Simbangda bagi seluruh OPD Provinsi agar dapat terlaksananya tertib administrasi pembangunan yang mana seluruh OPD malakukan tahapan upload dokumen sebagai data dukung dan ketepatan waktu melaksanakan tertib pelaksanaan administrasi pembangunan.
5. Pencapaian sasaran strategis 2 (dua) Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 yang diukur berdasarkan rata-rata capaian kinerja terhadap indikator kinerja yaitu ***Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja*** dengan capaian kinerja sebesar 104,19%
6. Pencapaian sasaran strategis 3 (tiga Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 yang diukur berdasarkan rata-rata capaian kinerja terhadap indikator kinerja yaitu ***Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi*** dengan capaian kinerja sebesar 110,28%

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Gambaran umum Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau/Biro Administrasi Pembangunan	1
1.2 Permasalahan Utama.....	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA	15
2.1 Perencanaan Strategis	15
2.2 Perjanjian Kinerja	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	20
3.1 Metodologi Pengukuran Pencapaian Target Kinerja	21
3.2 Hasil Pengukuran Kinerja	22
3.3 Capaian Kinerja Masing Masing Bagian	39
BAB IV PENUTUP	57
4.1 Kesimpulan.....	57
4.2 Permasalahan dan Kendala.....	58

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Tingkat Pendidikan Pegawai Biro	7
Tabel 1.2 Daftar Aset Biro Administrasi Pembangunan.....	9
Tabel 2.1 Ikhtisar PK Tahun 2022 Biro Administrasi Pemabangunan	19
Tabel 2.2.2 Program dan Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022.....	19
Tabel 3.1.1 Klasifikasi Penilaian Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis.....	22
Tabel 3.2.1 Perjanjian Kinerja Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	23
Tabel 3.2.2 Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan SKPD kondisi realisasi sampai 31 Desember 2022	25
Tabel 3.2.3 Dana Alokasi Khusus Fisik Prov. Sumatera Barat Tahun 2022.....	26
Tabel 3.3.4 Dana Alokasi Khusus Fisik Kab/Kota Se Sumatera Barat Tahun 2022	27
Tabel 3.2.5 Dana Dekonsentrasi dan tugas Perbantuan Sumatera Barat Tahun 2022	28
Tabel 3.2.6 Anggaran Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	30
Tabel 3.2.7 Perjanjian Kinerja Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	31
Tabel 3.2.8 Rekapitulasi Laporan Realisasi APBD Kab/Kota Se Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022 kondisi 31 Desember 2022	32
Tabel 3.2.9 Anggaran Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah.....	34
Tabel 3.2.10 Perjanjian Kinerja Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	35
Tabel 3.2.11 Anggaran Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	37
Tabel 3.2.12 Hasil Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Penetapan Kinerja Tahun 2022....	38
Tabel 3.3.1 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis	40
Tabel 3.3.2 Statistika Evidence Januari sampai Desember 2022	42
Tabel 3.3.3 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2021 dan 2022	46
Tabel 3.3.4 Realisasi Anggaran Program Administrasi Pembangunan Tahun 2022	47

Tabel 3.3.5	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2	48
Tabel 3.3.6	Realisasi Anggaran Tahun 2022.....	49
Tabel 3.3.7	Perbandingan Target dan Realisasi Sasaran 2 Tahun 2021 dan 2022	51
Tabel 3.3.8	Rekapitulasi Kuisioner	54
Tabel 3.3.9	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	55
Tabel 3.3.10	Hasil Kuisioner	56

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 GAMBARAN UMUM BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Biro Administrasi Pembangunan adalah salah satu unit kerja yang berada pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Biro ini merupakan unsur penunjang pelaksanaan tugas Pemerintah Provinsi untuk menyelenggarakan sebagian urusan daerah di bidang pengendalian pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten/Kota. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Peraturan Menteri Dalam Negari RI Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terbentuknya Biro Administrasi Pembangunan. Biro Administrasi Pembangunan ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 74 Tahun 2021 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Sebagai sebuah instansi pemerintahan lainnya, dimana salah satu wujud dari azas penyelenggaraan *good governance* maka Biro Administrasi Pembangunan wajib membuat dan menyajikan laporan akuntabilitas kinerjanya setiap tahun. Laporan akuntabilitas ini disusun dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sesuai dengan amanah Peraturan perundangan berlaku.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Barat dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan. Sementara tujuan dari penyusunan LAKIP Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai sarana dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder

atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan kepada Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Barat. Selain sebagai bahan evaluasi, laporan akuntabilitas kinerja ini diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka :

1. Mendorong Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Barat untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsi pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
2. Menjadikan Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Barat yang akuntabel, sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan yang tenram, tertib dan kondusif;
3. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja serta Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Barat guna membantu pelayanan kepada masyarakat lebih baik;
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pembangunan pada Biro Administrasi Pembangunan serta Biro Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Barat.

1.1.1 TUGAS POKOK DAN FUNGSI BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Selanjutnya dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas yaitu *“membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam menyiapkan pengordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah,*

Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan”.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat mempunyai fungsi sebagai berikut

- 1) penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan;
- 2) penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan;
- 3) penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan; dan
- 4) pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

1.1.2 STRUKTUR ORGANISASI

Biro Administrasi Pembangunan

Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang dipimpin oleh seorang Kepala Biro dalam melaksanakan tugas dan fungsi Biro dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Bagian dan 9 (sembilan) orang Kepala Sub Bagian sebagai berikut :

- 1. Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah**, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian

pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Tata Usaha. Untuk melaksanakan tugas tersebut Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian :

- a. Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD;
- b. Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN; dan
- c. Sub Bagian Tata Usaha.

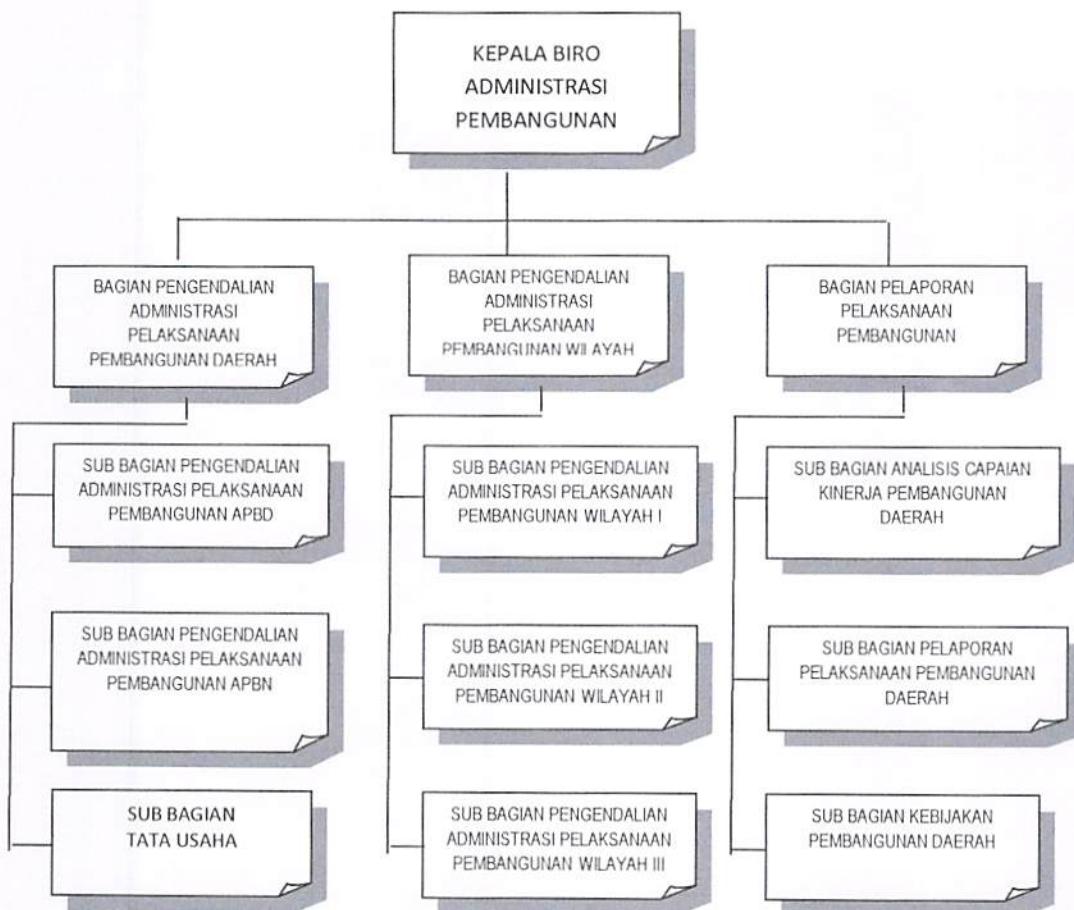
2. Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah I, Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah II dan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah III. Untuk melaksanakan tugas tersebut Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian :

- a. Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Peambangunan Wilayah I;
- b. Sub Bagian Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Peambangunan Wilayah II; dan
- c. Sub Bagian Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Peambangunan Wilayah III.

- 3. Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan**, mempunyai tugas pokok melaksanakan melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah, Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah dan Kebijakan Pembangunan Daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian :
- a. Sub Bagian Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah;
 - b. Sub Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah; dan
 - c. Sub Bagian Kebijakan Pembangunan Daerah.

Bagan 1.1
Bagan Struktur Organisasi Biro Administrasi Pembangunan
STRUKTUR ORGANISASI BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

(Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 74 Tahun 2021)



1.1.3 SUMBER DAYA SKPD

Sumber daya yang dimiliki untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Administrasi Pembangunan serta Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

A. Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya guna menghasilkan kinerja yang berkualitas perlu didukung oleh sumber daya manusia yang handal. Pada tahun 2022, Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat memiliki Aparatur Sipil Negara sebanyak 24 orang dan 5 Non Aparatur Sipil Negara dengan total seluruh pegawai 29 orang. Adapun rincian sebagai berikut 5 orang struktural, 6 orang fungsional penyetaraan, 13 orang fungsional umum. Selain itu Biro Administrasi Pembangunan dibantu 4 orang tenaga kontrak dan 1 orang tenaga IT kontrak. Dari 4 orang tenaga kontrak tersebut 2 orang tenaga kontrak dari Biro Umum yang diperbantukan pada Biro Administrasi Pembangunan. Pada tabel 1.1. dan grafik 1.1. berikut dapat dilihat kekuatan pegawai di Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 berdasarkan tingkat pendidikan.

Tabel 1.1.

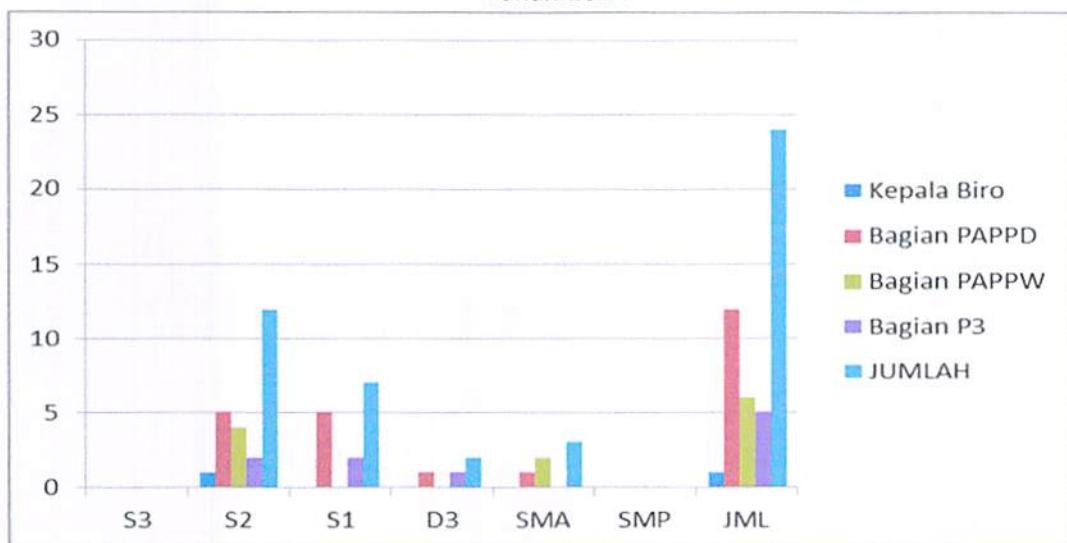
**Tingkat Pendidikan Pegawai Biro Administrasi Pembangunan
Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2022**

No.	URAIAN	PENDIDIKAN						JML
		S3	S2	S1	D3	SMA	SMP	
1.	Kepala Biro	0	1	0	0	0	0	1
2.	Bagian PAPPD	0	5	5	1	1	0	12
3.	Bagian PAPPW	0	4	0	0	2	0	6
4.	Bagian P3	0	2	2	1	0	0	5
JUMLAH		0	12	7	2	3	0	24

Sumber : Biro Administrasi Pembangunan Setda Prov. Sumatera Barat

Berdasarkan tabel 1.1. di atas dapat dilihat, pada tahun 2022 pegawai di Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Barat 50% berpendidikan S2 atau sebanyak 12 orang, 29.17% berpendidikan S1 atau sebanyak 7 orang, 8.33% berpendidikan D3 atau sebanyak 2 orang dan 12.5% berpendidikan SMU atau sebanyak 3 orang. Pegawai tersebut tersebar di 3 bagian yang ada dilingkungan Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Barat.

Grafik 1.1.
Tingkat Pendidikan Pegawai Biro Administrasi Pembangunan
Tahun 2022



B. Aset

Aset yang diserahkan pengelolaannya kepada Biro untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro dan Rantau per 31 Desember 2022 tercatat sebagaimana berikut.

Tabel 1.2



**DAFTAR ASET BIRO
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**

UNIT BIDANG : BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
PROVINSI : SUMATERA BARAT

KODE LOKASI: 11.01.11.00.400110.00000.00000.00000

No.	KODE BARANG	NAME BARANG	REGISTER	TAHUN PERCABAHAN	MERK/MODEL	UKURAN	HARGA SATUAN	JUMLAH BARANG	NOMOR BAKU	NOMOR IDENTIFIKASI	AKTUALISASI INVENTARISASI	NILAI PETOKUAN	PER AIU BAKU	BESARAN
1.17	1.3.2.05.02.06.000	Smart TV	1	2022	Samsung	55 inch	12.075.000,00	1	-	-	-	12.075.000,00	-	-
1.18	1.3.2.05.01.05.000	Laptop	2	2022	Lenovo	-	15.107.35,00	2	-	-	-	30.215.70,00	-	-
1.19	1.3.2.05.01.06.047	Perakitan Komputer	3	2022	SONY KEP-RA770	-	5.155.000,00	3	-	-	-	15.465.000,00	-	-
1.20	1.3.2.05.01.00.002	Computer P. C	1	2022	Asus All in One	-	14.706.000,00	3	-	-	-	44.118.000,00	-	-
1.21	1.3.2.05.01.02.020	Tablet	1	2022	Samsung Galaxy	-	18.990.000,00	1	-	-	-	18.990.000,00	-	-
1.22	1.3.2.05.01.03.030	Printer	1	2022	Dell (6120)	-	6.010.140,00	3	-	-	-	18.270.720,00	-	-
1.23	1.3.2.05.01.04.002	SEPEDA MOTOR	1	2022	Yamaha	-	34.890.000,00	1	-	-	-	34.890.000,00	-	-
1	1.3.2.05.01.00.002	Meja Kantor	1	2022	Esensi	-	1.048.000,00	1	-	-	-	1.048.000,00	-	-
2	1.3.2.05.01.04.007	Tempat Buku	1	2022	Frontline	-	1.520.000,00	2	-	-	-	3.040.000,00	-	-
3	1.3.2.05.01.04.010	Lampu Kantor	1	2022	Prudent	-	695.000,00	2	-	-	-	1.380.000,00	-	-
4	1.3.2.05.01.04.016	Folding Chair	1	2022	Matching	-	385.000,00	1	-	-	-	385.000,00	-	-
5	1.3.2.05.01.01.002	Meja Kantor Biro	1	2022	-	-	385.666,67	1	-	-	-	385.666,67	-	-
6	1.3.2.05.02.01.002	Meja Kantor Biro	1	2022	-	-	386.666,67	2	-	-	-	773.333,34	-	-
7	1.3.2.05.02.01.006	Meja Rap M	1	2022	-	-	7.150.000,00	2	-	-	-	14.300.000,00	-	-
8	1.3.2.05.02.03.002	Monitor	1	2022	Samsung Flat	-	1.230.000,00	1	-	-	-	1.230.000,00	-	-
9	1.3.2.05.02.04.117	Printer	1	2022	HP LJ 200	-	1.520.000,00	2	-	-	-	3.040.000,00	-	-
10	1.3.2.05.02.05.117	Printer	1	2022	HP LJ 200	-	1.520.000,00	1	-	-	-	1.520.000,00	-	-
11	1.3.2.05.02.06.128	Printer Desain	1	2022	Charm	-	3.520.000,00	1	-	-	-	3.520.000,00	-	-
12	1.3.2.05.02.01.164	Proyektor Multimedia	1	2022	Theta	-	17.475.500,00	1	-	-	-	17.475.500,00	-	-
13	1.3.2.05.02.02.001	Komputer PC	1	2022	-	-	8.962.000,00	1	-	-	-	8.962.000,00	-	-
14	1.3.2.05.02.02.117	Printer	1	2022	HP LaserJet	-	1.812.000,00	1	-	-	-	1.812.000,00	-	-
15	1.3.2.05.02.03.002	Printer dan Periferi Komputer	1	2022	SAE	-	4.820.000,00	1	-	-	-	4.820.000,00	-	-
16	1.3.2.05.02.04.002	Laptop	1	2022	Asus	-	9.380.000,00	1	-	-	-	9.380.000,00	-	-
17	1.3.2.05.02.04.006	Mouse	1	2022	Hyper X	RGB	1.958.000,00	1	-	-	-	1.958.000,00	-	-
18	1.3.2.05.02.01.30	Kursi Kantor Lipat	1	2022	-	-	1.198.000,00	2	-	-	-	2.396.000,00	-	-
19	1.3.2.05.02.03.008	Kursi Kantor Lipat	1	2022	-	-	2.58.500,00	2	-	-	-	5.179.000,00	-	-
20	1.3.2.05.02.01.009	Perawatan Tangan	1	2022	Pantene	-	75.000,00	1	-	-	-	150.000,00	-	-
21	1.3.2.05.02.04.005	Alat Kesehatan	1	2022	Lion	-	4.452.000,00	1	-	-	-	4.452.000,00	-	-
22	1.3.2.05.02.01.320	Kunci Rumah	1	2022	-	-	1.466.000,00	11	-	-	-	5.446.000,00	-	-
23	1.3.2.05.02.01.330	Laptop	1	2022	-	-	1.198.000,00	2	-	-	-	2.396.000,00	-	-
24	1.3.2.05.02.02.002	Laptop	1	2022	Lenovo	-	8.748.000,00	1	-	-	-	8.748.000,00	-	-
25	1.3.2.05.02.01.002	Laptop	1	2022	Lenovo	-	8.748.000,00	1	-	-	-	8.748.000,00	-	-
26	1.3.2.05.02.02.005	Mouse	1	2022	Toyota	-	2498	309.375.000,00	1	MAFP134301892023975	BA.62	309.375.000,00	30.731.750,00	-
27	1.3.2.05.02.06.002	Tablet	1	2022	Sony ILC-62375	-	12.612.000,00	1	-	-	-	12.612.000,00	-	-

NO.	KODE BARANG	NAMA BARANG	REGISTER	TAHUN PEBEROLEHAN	MEWAH/NAKALI	UHC/AN	HARGA SATUAN	JUMLAH BARANG	NOMOR BAHAGIA	NOMOR AKSES	NOMOR POLISI	AMARILASI PENGGANTIAN	NILAI PERC EHM	NILAI BUKU	RETAN
26	13.2.05.0.2.06.020	Lenovo D430	1	2015	Canon 70D	-	5.315.000,00	1	-	-	-	5.315.000,00	9.315.000,00	-	-
23	13.2.05.0.1.01.040	UPS	2	2015	UPS ICA-3600 1/4A 800W	-	7.700.000,00	1	-	-	-	7.700.000,00	7.700.000,00	-	-
30	13.2.05.0.0.02.01.040	Proyektor Mini	1	2015	Sony	-	21.000.000,00	1	-	-	-	21.000.000,00	21.000.000,00	-	-
31	13.2.05.0.0.1.02.005	Komputer PC	1	2015	Lenovo HS21e DC	-	8.140.000,00	1	-	-	-	8.140.000,00	8.140.000,00	-	-
32	13.2.05.0.0.2.02.017	Printer	1	2015	Epson L310	-	2.162.000,00	1	-	-	-	2.162.000,00	2.162.000,00	-	-
33	13.2.05.0.0.2.02.017	Printer	1	2015	HP P4040 M404N	-	4.910.000,00	1	-	-	-	4.910.000,00	4.910.000,00	-	-
34	13.2.05.0.0.2.06.077	Stasi Pengantin TV	1	2016	-	-	2.600.000,00	1	-	-	-	2.600.000,00	2.600.000,00	-	-
35	13.2.05.0.1.05.010	Lenovo B40-70	1	2016	-	-	6.436.000,00	1	-	-	-	6.436.000,00	6.436.000,00	-	-
36	13.2.05.0.1.02.003	Samsung PC	3	2016	HS100 DC	-	10.285.000,00	1	-	-	-	10.285.000,00	10.285.000,00	-	-
37	13.2.05.0.1.02.003	Laptop	1	2016	HP	-	8.458.000,00	1	-	-	-	8.458.000,00	8.458.000,00	-	-
38	13.2.05.0.1.01.007	Mein Tia Laut	1	2017	Brother	-	2.680.000,00	1	-	-	-	2.680.000,00	2.680.000,00	-	-
39	13.2.05.0.1.03.207	Mein Tia Laut	1	2017	Samsung	0	2.620.000,00	1	-	-	-	2.620.000,00	2.620.000,00	-	-
40	13.2.05.0.1.05.020	Mein Tia Laut	1	2017	ZSA Shredder	-	3.500.000,00	1	-	-	-	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-
41	13.2.05.0.0.2.01.002	Mein Tia Laut	1	2017	Asus	-	2.100.000,00	1	-	-	-	2.100.000,00	2.100.000,00	-	-
42	13.2.05.0.0.2.01.002	Mein Tia Laut	1	2017	Asus	-	2.100.000,00	1	-	-	-	2.100.000,00	2.100.000,00	-	-
43	13.2.05.0.0.2.01.002	Mein Tia Laut	1	2017	Asus	-	2.100.000,00	1	-	-	-	2.100.000,00	2.100.000,00	-	-
44	13.2.05.0.2.01.003	Mein Tia Laut	1	2017	Asus	-	2.100.000,00	1	-	-	-	2.100.000,00	2.100.000,00	-	-
45	13.2.05.0.0.1.01.003	Mein Tia Laut	1	2017	Asus	-	2.100.000,00	1	-	-	-	2.100.000,00	2.100.000,00	-	-
46	13.2.05.0.0.2.01.002	Mein Tia Laut	1	2017	Asus	-	2.100.000,00	1	-	-	-	2.100.000,00	2.100.000,00	-	-
47	13.2.05.0.0.2.002	Tv LED	1	2017	Samsung	43 inch	8.445.000,00	1	-	-	-	8.445.000,00	8.445.000,00	-	-
48	13.2.05.0.0.2.002	Tv LED	1	2017	Samsung	43 inch	8.445.000,00	1	-	-	-	8.445.000,00	8.445.000,00	-	-
49	13.2.05.0.0.2.002	Samsung	2	2017	Canon	-	22.300.000,00	1	-	-	-	22.300.000,00	22.300.000,00	-	-
50	13.2.05.0.0.2.01.010	Main Fax	1	2017	Brother	-	4.000.000,00	1	-	-	-	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-
51	13.2.05.0.0.1.02.003	PC All in One	1	2017	Lenovo	-	34.520.000,00	12	-	-	-	34.520.000,00	34.520.000,00	-	-
52	13.2.05.0.0.2.002	Printer Dot Matrix	1	2017	Epson	-	2.302.000,00	3	-	-	-	2.302.000,00	2.302.000,00	-	-
53	13.2.05.0.0.2.01.017	Printer Warna	1	2017	Epson	-	3.000.000,00	3	-	-	-	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-
54	13.2.05.0.0.2.002	Lamari Arang/Alas	2	2018	-	-	39.000.000,00	1	-	-	-	39.000.000,00	39.000.000,00	-	-
55	13.2.05.0.0.1.04.003	Lamari Arang/Alas	1	2018	-	-	15.000.000,00	2	-	-	-	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-
56	13.2.05.0.0.1.04.003	Lamari Arang/Alas	1	2018	-	-	15.000.000,00	2	-	-	-	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-
57	13.2.05.0.0.2.01.017	Lamari Arang/Alas	1	2018	-	-	11.000.000,00	1	-	-	-	11.000.000,00	11.000.000,00	-	-
58	13.2.05.0.0.1.04.003	Lamari Arang/Alas	1	2018	-	-	11.000.000,00	1	-	-	-	11.000.000,00	11.000.000,00	-	-
59	13.2.05.0.0.1.04.003	Lamari Arang/Alas	1	2018	-	-	11.000.000,00	1	-	-	-	11.000.000,00	11.000.000,00	-	-
60	13.2.05.0.0.1.04.003	Lamari Arang/Alas	1	2018	-	-	14.400.000,00	1	-	-	-	14.400.000,00	14.400.000,00	-	-
61	13.2.05.0.0.1.04.003	Lamari Arang/Alas	1	2018	Storage selang	50x40x133	2.900.000,00	2	-	-	-	2.900.000,00	2.900.000,00	-	-
62	13.2.05.0.0.2.01.003	Meja Bistro	1	2018	-	d150cm	6.000.000,00	1	-	-	-	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-
63	13.2.05.0.0.2.01.003	Kursi Meja Bistro	1	2018	-	d150cm	1.700.000,00	5	-	-	-	8.500.000,00	8.500.000,00	-	-
64	13.2.05.0.0.2.01.004	Kursi Meja Bistro	1	2018	-	d150cm	1.700.000,00	4	-	-	-	6.800.000,00	6.800.000,00	-	-
65	13.2.05.0.0.1.04.004	Kursi Meja Bistro	1	2018	-	d150cm	3.600.000,00	2	-	-	-	7.200.000,00	7.200.000,00	-	-
66	13.2.05.0.0.2.01.008	Meja Meeting Table	1	2018	Easy Meeting Table	1.3x120x76	14.950.000,00	1	-	-	-	34.950.000,00	34.950.000,00	-	-
67	13.2.05.0.0.1.04.014	Meja Receptionis	1	2018	Meja	240x85x105	4.870.000,00	1	-	-	-	4.870.000,00	4.870.000,00	-	-
68	13.2.05.0.0.2.01.017	Meja Kepala Biro	1	2018	Meja	200x85x77	18.000.000,00	1	-	-	-	18.000.000,00	18.000.000,00	-	-

NO.	KODE BARANG	NAMA BARANG	REGISTER	TAHUN PEROLEHAN	MESY/MODEL	URUAN	JARAK SATUAN	JUMLAH BAHANG	NOMBOR BAHANG	NOMBOR MESIN	NOMBOR POLISI	NOMBOR BPKS	NILAI PERLOHAN	AMALIASI PENYATAAN	NILAI BUKU	BBAN
69	1.3.2.0521.01.003	Kursi Rajat	1	2015	-	-	-	3.200.000,00	10	-	-	-	32.000.000,00	25.600.000,00	E-400.000,00	-
70	1.3.2.0521.01.048	Seja Tamu	1	2015	Kursi tamu dan minat	-	-	14.700.000,00	1	-	-	-	14.700.000,00	11.760.000,00	2.840.000,00	-
71	1.3.2.0521.04.002	Kursi	1	2015	Parasent	-	-	4.355.000,00	1	-	-	-	4.355.000,00	3.452.000,00	3.452.000,00	-
72	1.3.2.0521.06.038	Dipan	2	2015	Sifang	-	-	2.915.000,00	1	-	-	-	2.915.000,00	2.332.000,00	583.000,00	-
73	1.3.2.0521.06.077	Matras	1	2015	Parasent	-	-	1.595.000,00	1	-	-	-	1.595.000,00	1.276.000,00	315.000,00	-
74	1.3.2.0521.01.005	MELA KABAG	1	2015	Montra	-	-	9.950.000,00	1	-	-	-	9.950.000,00	7.960.000,00	1.960.000,00	-
75	1.3.2.0521.01.005	MELA KABAG	1	2015	Montra	260x1.50x75	9.950.000,00	1	-	-	-	-	9.950.000,00	7.960.000,00	1.960.000,00	-
76	1.3.2.0521.01.005	MELA KABAG	1	2015	Montra	260x1.50	9.950.000,00	1	-	-	-	-	9.950.000,00	7.960.000,00	1.960.000,00	-
77	1.3.2.0521.03.004	Kursi Kepala Biro	1	2015	Uzir Direktor Chair	-	-	7.950.000,00	1	-	-	-	7.950.000,00	6.160.000,00	1.550.000,00	-
78	1.3.2.0521.03.005	Kursi Kabag	1	2015	Former Managerial Chair	-	-	4.950.000,00	1	-	-	-	4.950.000,00	3.940.000,00	990.000,00	-
79	1.3.2.0521.03.005	Kursi Kabag	1	2015	Former Managerial Chair	-	-	4.950.000,00	1	-	-	-	4.950.000,00	3.940.000,00	990.000,00	-
80	1.3.2.0521.03.005	Kursi Kabag	1	2015	Former Managerial	-	-	4.950.000,00	1	-	-	-	4.950.000,00	3.940.000,00	990.000,00	-
81	1.3.2.0521.03.005	Kursi Kauk	1	2015	Liverpool Managerial	-	-	2.490.000,00	9	-	-	-	22.320.000,00	17.852.000,00	4.464.000,00	-
82	1.3.2.0521.03.003	Kursi Hadap Kabinet	1	2015	-	-	-	2.200.000,00	2	-	-	-	4.400.000,00	3.532.000,00	880.000,00	-
83	1.3.2.0521.03.003	Kursi Hadap Kabinet	1	2015	-	-	-	2.200.000,00	2	-	-	-	4.400.000,00	3.532.000,00	880.000,00	-
84	1.3.2.0521.03.003	Kursi Hadap Kabinet	1	2015	-	-	-	2.200.000,00	2	-	-	-	4.400.000,00	3.532.000,00	880.000,00	-
85	1.3.2.0521.03.003	Kursi Hadap Kabinet Biro	2	2015	Ratu 123 Visitor Chair	-	-	2.450.000,00	2	-	-	-	2.500.000,00	2.225.000,00	545.000,00	-
86	1.3.2.0521.03.003	Kursi Hadap Kabinet	2	2015	-	-	-	2.200.000,00	10	-	-	-	22.000.000,00	17.600.000,00	4.400.000,00	-
87	1.3.2.0521.02.657	Projector/Projector	1	2018	BenQ MW5390	-	-	15.200.000,00	1	-	-	-	15.200.000,00	11.160.000,00	3.040.000,00	-
88	1.3.2.0521.02.003	PC All In One	2	2018	LENOVO	-	-	14.850.000,00	3	-	-	-	44.550.000,00	44.550.000,00	-	-
89	1.3.2.0521.02.003	PC All In One	2	2018	Lenovo	-	-	15.200.000,00	9	-	-	-	137.700.000,00	137.700.000,00	-	-
90	1.3.2.0521.02.002	Laptop	1	2018	Lenovo	-	-	12.900.000,00	4	-	-	-	51.600.000,00	51.600.000,00	-	-
91	1.3.2.0521.02.002	Laptop	1	2018	LENOVO	Min 510	-	14.900.000,00	1	-	-	-	14.900.000,00	14.900.000,00	-	-
92	1.3.2.0521.03.004	Scanner (Penitikan Personal Komputer)	1	2018	Fujitsu	-	-	4.700.000,00	2	-	-	-	3.400.000,00	3.400.000,00	9.400.000,00	-
93	1.3.2.0521.04.002	Seri A	1	2018	Lenovo	-	-	9.200.000,00	1	-	-	-	32.000.000,00	22.000.000,00	-	-
94	1.3.2.0521.05.008	Thermal 1	1	2020	LG156	-	-	2.000.000,00	1	-	-	-	2.000.000,00	800.000,00	1.200.000,00	-
95	1.3.2.0521.05.008	Thermal 2	1	2020	Akira	-	-	1.200.000,00	1	-	-	-	1.200.000,00	410.000,00	720.000,00	-
96	1.3.2.0521.05.008	Wardail	1	2020	Latal	-	-	2.000.000,00	1	-	-	-	2.000.000,00	800.000,00	1.200.000,00	-
97	1.3.2.0521.02.001	FC Lant	1	2021	0	0	17.317.881.00	1	0	0	0	0	17.317.881.00	4.325.470.00	12.985.410.00	-
98	1.3.2.0521.02.001	FC Lant	1	2021	0	0	17.317.881.00	1	0	0	0	0	17.317.881.00	4.325.471.00	12.985.413.00	-
99	1.3.2.0521.02.001	FC Lant	1	2021	0	0	17.317.881.00	1	0	0	0	0	17.317.881.00	4.325.471.00	12.985.413.00	-
100	1.3.2.0521.02.001	FC Lant	1	2021	0	0	17.317.881.00	1	0	0	0	0	17.317.881.00	4.325.471.00	12.985.413.00	-
101	1.3.2.0521.02.001	FC Lant	1	2021	0	0	17.317.881.00	1	0	0	0	0	17.317.881.00	4.325.471.00	12.985.413.00	-
102	1.3.2.0521.02.001	FC Lant	1	2021	0	0	17.317.881.00	1	0	0	0	0	17.317.881.00	4.325.471.00	12.985.413.00	-
103	1.3.2.0521.02.001	FC Lant	1	2021	0	0	17.317.881.00	1	0	0	0	0	17.317.881.00	4.325.471.00	12.985.413.00	-
104	1.3.2.0521.02.001	FC Lant	1	2021	0	0	17.317.881.00	1	0	0	0	0	17.317.881.00	4.325.471.00	12.985.413.00	-
105	1.3.2.0521.02.001	FC Lant	1	2021	0	0	17.317.881.00	1	0	0	0	0	17.317.881.00	4.325.471.00	12.985.413.00	-
106	1.3.2.0521.02.001	FC Lant	1	2021	0	0	24.227.402.00	1	0	0	0	0	24.227.402.00	6.556.850,5	18.170.551.50	-
107	1.3.2.0521.02.001	Netbook	1	2021	0	0	14.084.648.00	1	0	0	0	0	14.084.648.00	5.511.162.00	10.563.486.00	-
108	1.3.2.0521.02.001	Net Book	1	2021	0	0	14.084.648.00	1	0	0	0	0	14.084.648.00	5.511.162.00	10.563.486.00	-
109	1.3.2.0521.02.001	Printer (Periataan Personal Komputer)	1	2021	0	0	5.146.421.00	1	0	0	0	0	5.146.421.00	1.365.605.15	3.859.815.75	-

101	13.1100102.001	PCUnit	1	2021	0	0	17.317.884,00	1	0	0	0	0	17.317.884,00	0	4.325.471,00	4.325.471,00	12.368.413,00
102	13.1100102.001	PCUnit	1	2021	0	0	17.317.884,00	1	0	0	0	0	17.317.884,00	0	4.325.471,00	4.325.471,00	12.368.413,00
103	13.1100102.002	PCUnit	1	2021	0	0	17.317.884,00	1	0	0	0	0	17.317.884,00	0	4.325.471,00	4.325.471,00	12.368.413,00
104	13.1100102.001	PCUnit	1	2021	0	0	17.317.884,00	1	0	0	0	0	17.317.884,00	0	4.325.471,00	4.325.471,00	12.368.413,00
105	13.1100102.001	PCUnit	1	2021	0	0	17.317.884,00	1	0	0	0	0	17.317.884,00	0	4.325.471,00	4.325.471,00	12.368.413,00
106	13.1100102.001	PCUnit	1	2021	0	0	24.227.462,00	1	0	0	0	0	24.227.462,00	6.056.650,5	18.170.551,50		
107	13.1100102.003	Note Book	1	2021	0	0	14.084.648,00	1	0	0	0	0	14.084.648,00	3.511.162,00	10.563.486,00		
108	13.1100102.003	Note Book	1	2021	0	0	14.084.648,00	1	0	0	0	0	14.084.648,00	3.521.162,00	10.563.486,00		
109	13.1100203.003	Printer (Penitakan Personal Komputer)	1	2021	0	0	5.146.411,00	1	0	0	0	0	5.146.411,00	1.286.605,25	3.859.415,75		

NO.	KODE BARANG	NAMA BARANG	REGISTER	TAHUN PEROLEHAN	MERK/MODEL	UMURAN	HARGA SATUAN	JUMLAH BAHARUNG	NOMOR RANGGA	NOMOR MELIN	NOMOR POLISI	NOMOR BINGKIS	AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU	BEBAN	
110	1.3.2.10.02.03.003	Printer (Penaltan Personal Komputer)	1	2021		0	5.146.421,00	1	0	0	0	0	5.146.421,00	1.236.605,25	3.859.815,75	-
111	1.3.2.10.02.03.003	Printer (Penaltan Personal Komputer)	1	2021		0	5.146.421,00	1	0	0	0	0	5.146.421,00	1.236.605,25	3.859.815,75	-
112	1.3.2.10.02.03.003	Printer (Penaltan Personal Komputer)	1	2021		0	5.146.421,00	1	0	0	0	0	5.146.421,00	1.236.605,25	3.859.815,75	-
113	1.3.2.10.02.03.003	Printer (Penaltan Personal Komputer)	1	2021		0	5.146.421,00	1	0	0	0	0	5.146.421,00	1.236.605,25	3.859.815,75	-
114	1.3.2.10.02.03.003	Printer (Penaltan Personal Komputer)	1	2021		0	5.146.421,00	1	0	0	0	0	5.146.421,00	1.236.605,25	3.859.815,75	-
115	1.3.2.10.02.03.004	Scanner (Penaltan Personal Komputer)	1	2021		0	4.933.510,00	1	0	0	0	0	4.933.510,00	1.244.631,5	3.745.357,50	-
116	1.3.2.10.02.03.004	Scanner (Penaltan Personal Komputer)	1	2021		0	4.933.510,00	1	0	0	0	0	4.933.510,00	1.244.631,5	3.745.357,50	-

NILAI PEROLEHAN	2.977.540.706,00
AKUMULASI PENYUSUTAN	1.964.021,99
NILAI/SALDO BUKU	473.495.507,00
BEBAN PENYUSUTAN TAHUN 2	-

1.2 PERMASALAHAN UTAMA

Pada saat ini Biro Administrasi Pembangunan terdapat 3 (tiga) Sasaran Startegis dan 3 (tiga) Indikator Kinerja. Kondisi ini berbeda dengan tahun 2022 yang hanya 2 (dua) Sasaran Startegis dan 2 (dua) Indikator Kinerja. Adapun yang menjadi permasalahan utama dan menjadi sasaran strategis Biro Administrasi Pembangunan dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan RPJMD 2021-2026 yaitu ***Persentasi Perangkat Daerah dan Pemerintahan Kabupaten/Kota Yang Tertib Administrasi Pelaksanaan Pembangunan.*** Biro Administrasi Pembangunan bertujuan bagaimana seluruh Perangkat Daerah (OPD Provinsi Sumatera Barat) dan Kabupaten/Kota untuk dapat melakukan tertib administrasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang anggarannya dari dana APBD dan APBN.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat 2021-2026 sebagai titik awal untuk melakukan pengukuran kinerja memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategi, kebijakan dan program/kegiatan/sub kegiatan serta indikator kinerja untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan perubahan Renstra Tahun 2021-2026 dan DPA/DPPA Tahun Anggaran 2022 Biro Administrasi Pembangunan sesuai kebijakan Gubernur Sumatera Barat untuk peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi dan OPD Provinsi Sumatera Barat, Biro Administrasi Pembangunan dalam melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah mempergunakan e-SAKIP. Untuk Biro Administrasi Pembangunan dalam melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mempergunakan e-SAKIP berdasarkan Renstra 2021-2026 serta DPA Biro Administrasi Pembangunan Tahun 2022.

2.1 PERENCANAAN STRATEGIS

2.1.1 *Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Rencana Strategis 2021-2026*

Visi Gubernur Sumatera Barat 2021-2026 merupakan gambaran tentang apa yang ingin diwujudkan, maka visi Provinsi Sumatera Barat yang menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah. Sesuai dengan Visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih merupakan janji politik yang disampaikan saat kampanye. Visi dan Misi ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, maka Visi

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera barat tahun 2021-2026 adalah :

“TERWUJUDNYA SUMATERA BARAT MADANI YANG UNGGUL DAN BERKELANJUTAN”

Untuk mewujudkan Visi tersebut ditetapkan Misi Gubernur Sumatera Barat yang pada dasarnya merupakan upaya umum dan akan diselenggarakan serta menjadi gambaran otentik Provinsi Sumatera Barat dalam 5 (lima) tahun mendatang pada kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih untuk periode RPJMD tahun 2021-2026.

Misi merupakan upaya umum yang ditetapkan dan dilaksanakan bersama masyarakat untuk dapat mewujudkan visi pembangunan daerah dan berdasarkan pengertian Misi tersebut maka Misi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya asing.
2. Meningkatkan tata kehidupan social kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah.
3. Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.
4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industry kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital
5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan.
6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan.
7. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas.

Biro Administrasi Pembangunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terhadap pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan kepada Misi 7 yaitu “**Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas**” dengan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Tujuan “ Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan dengan aparatur yang melayani “

Sasaran “ Meningkatnya kualitas tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel “

Dari Visi, Misi dan Tujuan yang tersebut di atas **Strategi** yang akan dicapai Biro Administrasi Pembangunan berdasarkan RPJMD 2021-2026 yaitu “ *Meningkatkan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah* “ dengan Arah Kebijakan adalah “ *Peningkatan kualitas pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah dan perangkat daerah*”

Sedangkan Indikator Kinerja Kunci Biro Administrasi Pembangunanyang termuat dalam RPJMD 2021-2026 yang menjadi sasaran Biro Administrasi Pembangunan adalah “ ***Persentasi Perangkat Daerah dan Pemerintahan Kabupaten/Kota Yang Tertib Administrasi Pelaksanaan Pembangunan (%)*** “, yang menjadi **Sasaran Strategis 1 (satu) Biro**.

Sasaran Strategis 2 (dua) berdasarkan Perjanjian Kinerja 2022 yaitu “ ***Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi“***

Sasaran Strategis 2 (tiga) berdasarkan Perjanjian Kinerja 2022 yaitu “ ***Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi“***

RPJMD 2021-2026

MISI (7) MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERSIH, AKUNTABEL SERTA BERKUALITAS

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	TERWUJUDKAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DENGAN APARATUR YANG MELAYANI	MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL	MENINGKATKAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PENINGKATAN KUALITAS PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PERANGKAT DAERAH

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH TERHADAP CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN PROVINSI SUMATERA BARAT

NO	IKK	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	PERSENTASI PERANGKAT DAERAH DAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA YANG TERTIB DALAM PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	90	90	91	92	93	94	95

2.2 PERJANJIAN KINERJA

Tabel 2.1
Ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2022
Biro Administrasi Pembangunan

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Mewujudkan Pengendalian Pembangunan yang Optimal	Persentase Perangkat Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Tertib Administrasi Pelaksanaan Pembangunan	91
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	B (61)
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	Baik (80)

Tabel 2.2
Program dan Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022
Biro Administrasi Pembangunan

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	2	3
I	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.134.861.003
I.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	37.988.000
I.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	75.285.000
I.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	18.800.000
I.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	45.339.600
I.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	736.531.203
I.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	35.600.000
I.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75.887.850
I.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	109.429.350
II	KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	2.203.583.000
II.1	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1.355.758.500
II.2	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	847.824.500
J U M L A H		3.338.444.003

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Proses penyusunan pelaporan kinerja dilakukan setiap akhir tahun anggaran bagi instansi dengan tujuan untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan. Pengukuran ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja, dimana pelaporan kinerja ini akan menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis dan disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai suatu pijakan dapat diwujudkan.

Tujuan menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis dan periodik adalah untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022. Pengukuran capaian target indikator kinerja tersebut ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Biro Administrasi Pembangunan terhadap Perubahan Tahun 2022. Hasil pengukuran capaian target kinerja disampaikan dalam bentuk Laporan Kinerja Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022.

Akuntabilitas Kinerja merupakan gambaran dari pengukuran kinerja, yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dari pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut. Cakupan pengukuran kinerja adalah penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja.

Hasil pengukuran kinerja didapatkan dari suatu penilaian sistematik dan didasarkan kepada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa indikator-indikator masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*). Sesuai dengan tugas dan fungsi Biro dalam memfasilitasi, melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan serta urusan

lain yang menunjang kebijakan Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka indikator ini didasarkan atas dampak jangka pendek yang dapat diukur baik secara kuantitatif maupun kualitatif dari kegiatan tahunan yang telah dilaksanakan. Sedangkan untuk indikator manfaat (*benefits*) dan dampak (*impacts*) tidak dapat digunakan, karena indikator ini akan lebih efektif digunakan sebagai pengukuran kinerja jangka panjang, dimana dalam pengukuran indikator kinerja ini perlu penelitian, analisa dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan serta aplikasinya di lapangan.

3.1 METODOLOGI PENGUKURAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA

Dalam pengukuran akuntabilitas kinerja diperlukan data pendukung pelaksanaan kegiatan yang berasal dari sumber internal dan eksternal, dengan pengertian sebagai berikut :

- a. **Data Internal**, yaitu yang berasal dari sistem informasi yang ada pada Biro Administrasi Pembangunan serta Biro Administrasi Pembangunan, dimana tingkat pengolahan data dilakukan pada level Bagian dan Sub Bagian serta staf yang berada pada Biro.
- b. **Data Eksternal**, yaitu data yang berasal dari stakeholder atau pihak-pihak di luar Biro Administrasi Pembangunan

Biro Administrasi Pembangunan mendapatkan data melalui :

- 1) Rapat-rapat koordinasi antara Asisten dengan OPD Provinsi, Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota,
- 2) Rapat kerja/rapat koordinasi/bimbingan teknis/rapat dan pertemuan reguler Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, Badan/Dinas/Biro/ Bagian yang berwenang dalam urusan pembangunan.
- 3) Rapat kerja dalam rangka melakukan pelaporan realisasi fisik dan keuangan berdasarkan aplikasi Simbangda berbasis Evidence.

Pengukuran capaian target indikator kinerja yang dilakukan adalah pengukuran pencapaian target kinerja indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Biro Administrasi Pembangunan.

Untuk membuat kesimpulan hasil kinerja, digunakan skala pengukuran kinerja dengan cara mengelompokkan nilai capaian kinerja dari setiap kegiatan, yang besarnya diklasifikasikan berdasarkan tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Klasifikasi Penilaian Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Hasil Capaian (%)	Kategori Penilaian
85 - < 100	Sangat berhasil
75 - < 84	Berhasil
56- < 74	Cukup Berhasil
< 55	Tidak Berhasil

Pengukuran kinerja sebagaimana tabel tersebut di atas, mengacu kepada kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, bahwa pencapaian kinerja sasaran dapat dikatakan berhasil jika indikator keberhasilannya dapat diwujudkan $> 75\%$.

3.2 HASIL PENGUKURAN KINERJA

3.2.1 CAPAIAN KINERJA BAGIAN

Hasil pengukuran kinerja Biro Administrasi Pembangunan tahun 2022 dilakukan mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2022 yang dilaksanakan oleh 3 (tiga) Bagian pada Biro Administrasi Pembangunan.

I. BAGIAN PENGENDALIAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan Kepala Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah berpedoman kepada Perjanjian Kinerja Kepala Bagian dengan Kepala Biro dengan sasaran dan indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel. 3.2.1
Perjanjian Kinerja Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan
Pembangunan Daerah

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya ketepatan waktu pelaksanaan pembangunan	Persentase pelaksanaan kegiatan tepat waktu	91%
2.	Optimalnya tertib administrasi pembangunan	Tingkat kesesuaian administrasi pelaksanaan kegiatan dengan standar pada Perangkat Daerah	91%
3.	Optimalisasi pengendalian pembangunan	Persentase rekomendasi yang diberikan terhadap permasalahan administrasi pembangunan Provinsi	91%
4.	Meningkatnya pengawasan organisasi	Berkurangnya temuan pemeriksaan terhadap organisasi	10%

Berdasarkan Perjanjian kinerja pada tabel 3.2.1 tersebut untuk pelaksanaan kegiatan pada Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah mempunyai Indikator Kinerja Program yaitu ***“Persentase Realisasi Fisik dan Keuangan APBD dengan target 91%”***

Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah untuk tahun 2022 melaksanakan 2 Sub Kegiatan yaitu

a. Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD, yang melaksanakan kegiatan :

- Pelaksanaan monev paket kegiatan di SKPD se-Sumatera Barat
- Pelaksanaan rapat-rapat penyelesaian masalah
- Pelaksanaan rakor dengan OPD
- Pembuatan laporan triwulan, dan laporan akhir kegiatan

- Kegitan insidentil seperti pendampingan tamu resmi dll

Untuk realisasi Fisik sampai tanggal 31 Desember 2022 Perangkat Daerah Provinsi Sumatera sebesar :

$$\frac{96,49}{99,52} \times 100\% = 96,95\%$$

Dari hasil realisasi fisik 96,95% berarti melebihi dari target pada Indikator Kinerja Program Kegiatan *Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD* sebesar 91%

Untuk realisasi Keuangan sampai tanggal 31 Desember 2022 Perangkat Daerah Provinsi Sumatera sebesar :

$$\frac{93,92}{99,92} \times 100\% = 93,99\%$$

Dari hasil realisasi fisik 93,99% berarti melebihi dari target pada Indikator Kinerja Program Kegiatan *Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD* sebesar 91%

Angka realisasi fisik dan keuangan dapat dilihat pada Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Hasil Rekapitulasi Aplikasi Simbangda) tabel 3.2.2 sebagai berikut :

Tabel 3.2.2

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
APBD PERUBAHAN Tahun 2022

Laporan Rekap Realisasi Fisik Dan Keuangan Per SKPD
kondisi realisasi sampai 31 Desember 2022

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	Fisik				Keuangan				Fisik				Keuangan				Fisik				Keuangan			
	T	R	D	R	T	R	D	R	T	R	D	R	T	R	D	R	T	R	D	R	T	R	D	R
BALAI KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	100,00	98,38	-1,62	100,00	96,38	-3,62	0,00	0,00	100,00	103,00	0,00	99,81	99,01	-0,80	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	97,74	-2,26
BALAI PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	100,00	93,26	-6,74	100,00	94,78	5,22	0,00	0,00	100,00	101,00	0,00	99,81	98,17	-1,83	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	94,95	-5,05			
BIRO HUKUM	96,97	99,75	2,78	100,00	81,03	-18,97	0,00	0,00	100,00	98,32	-1,68	100,00	98,17	-0,83	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	94,92	-5,07			
BIRO KESATUAN TERITORI RAKYAT	100,00	95,89	-4,11	100,00	91,48	-8,42	0,00	0,00	100,00	96,09	-3,91	100,00	94,69	-5,31	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	95,12	-4,87			
BIRO TEPERDIDAYAKAN DAN OTONGANI DAERAH	100,00	97,71	-2,29	100,00	98,69	1,91	0,00	0,00	100,00	99,22	-0,78	100,00	95,85	-4,15	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	95,80	-4,20			
DINAS KEBUDAYAAN	100,00	100,00	0,00	99,64	96,28	-3,36	0,00	0,00	100,00	82,80	-17,20	99,92	91,95	-7,97	0,00	100,00	99,23	-1,77	100,00	98,65	-1,35			
DINAS KEPERDIDAKAN DAN PENDIDAKAN SPRINT	100,00	100,00	0,00	98,25	100,00	1,75	0,00	0,00	100,00	99,25	-0,72	100,00	89,14	-11,86	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	96,72	-3,28			
DINAS KESIHATIAN	94,83	90,30	-4,53	99,87	90,22	-9,65	0,00	0,00	100,00	94,12	-3,76	3,56	85,22	91,23	5,01	0,00	100,00	99,55	-0,45	100,00	93,22	-6,78		
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	100,00	98,69	-1,31	100,16	97,92	-2,24	0,00	0,00	100,00	103,00	0,00	97,77	96,89	-0,88	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	99,23	-0,77			
DINAS PEMERDIDAYAKAN, PEMERDIDAKAN DAN PELINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENILOUD DAN KELLARGA BERPENGARUH	100,00	105,00	0,00	96,22	95,84	-0,38	0,00	0,00	100,00	96,83	-56,67	-0,16	100,00	95,11	-4,89	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	97,18	-2,82		
DINAS PARIWISATA	100,00	99,46	-0,54	100,00	93,70	-6,80	0,00	0,00	100,00	102,00	0,00	100,00	94,42	-5,58	0,00	100,00	99,95	-0,95	100,00	97,17	-2,83			
DINAS PERHIBURGAN	100,00	87,04	-12,96	100,00	95,93	-4,07	0,00	0,00	100,00	103,00	0,00	100,00	96,82	-3,17	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	96,08	-3,92			
DINAS PENDIDIKAN	100,00	99,46	-0,54	100,00	98,09	-1,91	0,00	0,00	100,00	99,51	-0,49	100,00	93,57	-6,43	0,00	100,00	99,14	-0,86	100,00	93,28	-6,72			
DINAS SATUAN POLISI PEMERINTAH PAGA	100,00	99,46	-0,54	100,00	98,09	-1,91	0,00	0,00	100,00	99,37	78,14	-21,23	100,00	60,25	39,75	0,00	100,00	96,14	-3,86	100,00	93,30	-6,70		
DINAS SOSIAL	100,00	93,62	-6,98	100,00	97,46	2,54	0,00	0,00	100,00	99,00	9,64	0,00	100,00	94,42	-5,58	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	97,17	-2,82		
RUMAH SAKIT IJWA PROF. HIB SANIN	100,00	98,33	-1,67	100,00	96,46	-3,54	0,00	0,00	100,00	91,39	8,61	100,00	75,87	-4,13	0,00	100,00	98,58	-1,42	100,00	96,56	-3,33			
RUMAH SAKIT UMMU DAERAH DR. ACHMAD MOCHtar BUTTINGI	100,00	100,00	0,00	100,00	98,66	-1,34	0,00	0,00	100,00	90,75	-9,02	100,00	82,31	-17,69	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	98,17	-1,83			
RUMAH SAKIT UMMU DAERAH MOHAMMAD Natsir	100,00	99,17	-0,83	100,00	70,23	-29,77	0,00	0,00	100,00	83,71	-16,29	100,02	98,42	-1,59	0,00	100,00	96,37	-3,63	100,00	93,65	-6,35			
RUMAH SAKIT UMMU DAERAH PARIMAN	100,00	97,75	-2,25	100,00	93,54	-1,46	0,00	0,00	100,00	99,80	-1,80	100,00	95,47	-4,53	0,00	100,00	97,92	-1,76	100,00	97,27	-2,73			
Rata - rata	99,54	97,17	-2,37	99,97	94,39	-5,58	0,00	0,00	100,00	99,37	94,53	-4,84	99,68	88,43	-11,25	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	97,74	-2,26		

Statistika Data Deviasi SKPD:

Keterangan	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA				ASISTEN PEMERINTAHAN DAN PERBANGUNAN				ASISTEN ADMINISTRASI UMUM				Kuangan				Fisik				Keuangan			
	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	T	R	D	T	R	D	T	R	D			
Deviasi Dikurang 10%	1	2	3	4	1	1	5	6					93,52	96,49	-3,03	99,92	93,92	-6,00						
Deviasi Dikurang 5%	2	4	3	4	0	5	5	13																
Deviasi Dikurang 5%	15	12	12	11	15	10	42	33																
Total Data	18		18		16		52																	

Keterangan:
T : Target
R : Realisasi
D : Deviasi
Deviasi Dikurang 10%
Deviasi Dikurang 5%

Keterangan:
T : Target
R : Realisasi
D : Deviasi
Deviasi Dikurang 10%
Deviasi Dikurang 5%

b. Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN, melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- Pelaksanaan monev paket kegiatan di SKPD yang memiliki sumber dana perimbangan seperti DAK Fisik, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dan koordinasi dengan satuan kerja Kementerian/Lembaga yang melaksanakan kegiatan di Sumatera Barat.
 - Pelaksanaan rapat-rapat penyelesaian masalah pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dana bersumber dari APBN
 - Pelaksanaan Rapat Koordinasi dengan OPD, Satker Kementerian, dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Sumatera Barat.
 - Pembuatan laporan triwulan, dan laporan akhir kegiatan
 - Kegitan insidentil seperti pendampingan tamu resmi dll
- Berdasarkan Perjanjian kinerja tersebut untuk pelaksanaan kegiatan pada Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah mempunyai Indikator Kinerja Program “**Persentase Realisasi Fisik dan Keuangan APBN dengan target 91%**”. Hasil dari pelaksanaan kegiatan 2022 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel. 3.2.3

DANA ALOKASI KHUSUS FISIK PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2022

NO	BIDANG	PAGU	REALISASI	PERSENTASE
1	Irigasi	12.747.874.000	10.173.332.500	79,80%
2	Jalan	53.695.096.000	52.689.920.285	98,13%
3	Kehutanan	9.332.104.000	5.975.375.700	64,03%
4	Kelautan dan Perikanan	12.236.600.000	10.013.507.210	81,83%
5	Kesehatan dan KB	42.946.675.000	28.383.738.232	66,09%
6	Pendidikan	149.019.964.000	147.923.201.849	99,26%
	TOTAL	279.978.313.000	255.159.075.776	91,14%

Sumber :Data Kanwil DJPb Sumatera Barat tanggal 31 Desember 2022

Dari tabel 3.2.3 dapat dilihat bahwa persentase realisasi Keuangan Dana Alokasi Khusus Fisik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 sebesar 91,14% yang artinya melebihi target Indikator Kinerja Program Kebijakan Administrasi Pembangunan sebesar 91%.

Tabel. 3.2.4

DANA ALOKASI KHUSUS FISIK KABUPATEN/KOTA SE- SUMATERA BARAT TAHUN 2022

NO	BIDANG	PAGU	REALISASI	PERSENTASE
1	KAB. A G A M	106.357.523.000	92.154.654.218	86,65%
2	KAB. DHARMAS RAYA	68.025.379.000	64.465.577.604	94,77%
3	KAB. KEPULAUAN MENTAWAI	82.004.624.000	66.556.524.219	81,16%
4	KAB. LIMAPULUH KOTA	114.473.134.000	98.518.292.418	86,06%
5	KAB. PADANG PARIAMAN	106.116.082.000	93.252.089.236	87,88%
6	KAB. PASAMAN	98.068.246.000	84.636.954.404	86,30%
7	KAB. PASAMAN BARAT	98.954.464.000	88.441.827.611	89,38%
8	KAB. PESISIR SELATAN	173.793.191.000	160.741.464.312	92,49%
9	KAB. S O L O K	109.864.506.000	97.897.272.916	89,11%
10	KAB. SIJUNJUNG	131.972.946.000	98.020.713.771	74,27%
11	KAB. SOLOK SELATAN	90.874.080.000	82.711.466.024	91,02%
12	KAB. TANAH DATAR	59.161.144.000	54.441.949.954	92,02%
13	KOTA BUKITTINGGI	50.709.363.000	38.100.592.208	75,14%
14	KOTA PADANG	57.701.647.000	50.246.336.758	87,08%
15	KOTA PADANG PANJANG	26.013.378.000	21.616.550.919	83,10%
16	KOTA PARIAMAN	34.300.667.000	31.604.833.631	92,14%
17	KOTA PAYAKUMBUH	44.876.767.000	37.979.453.743	84,63%
18	KOTA S O L O K	31.055.651.000	27.199.217.536	87,58%
19	KOTA SAWAHLUNTO	88.905.642.000	74.358.095.142	83,64%
	TOTAL	1.573.228.434.000	1.362.943.866.624	86,63%

Sumber :Data Kanwil DJPb Sumatera Barat tanggal 31 Desember 2022

Data dari tabel 3.2.4 merupakan realisasi keuangan pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Fisik se Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Tahun 2022 sebesar 86,63%, Berarti realisasinya tidak memenuhi target yang ada pada Indikator Kinerja Program sebesar 91%. Kondisi ini disebabkan karena sampai tanggal 10 Jaunari 2023 masih banyak Kabupaten/Kota yang belum melakukan pelaporan melalui aplikasi Omspan Kementerian Keuangan RI.

Tabel. 3.2.5

DANA DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN SUMATERA BARAT TAHUN 2022

N O	SATKER	PAGU	REALISASI	(%)
A.	DEKONSENTRASI	57.617.960.000	49.280.574.273	85,53%
1	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT	1.980.460.000	1.979.852.000	99,97%
2	DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT	14.765.446.000	7.536.043.450	51,04%
3	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI SUMATERA BARAT	10.419.510.000	9.932.573.147	95,33%
4	BAPPEDA PROVINSI SUMATERA BARAT	1.196.688.000	1.189.976.418	99,44%
5	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPM &PTSP) PROV. SUMATERA BARAT	592.146.000	590.968.901	99,80%
6	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI SUMATERA BARAT	521.861.000	511.880.362	98,09%
7	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI SUMATERA BARAT	2.859.250.000	2.796.647.240	97,81%
8	DINAS PARIWISATA PROVINSI SUMATERA BARAT	1.490.000.000	1.433.570.366	96,21%
9	DINAS PERKEBUNAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SUMATERA BARAT	15.966.342.000	15.819.090.725	99,08%
10	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SUMATERA BARAT	4.393.843.000	4.260.014.584	96,95%
11	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN SUMATERA BARAT	2.095.381.000	2.053.604.151	98,01%
12	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT	999.955.000	853.827.084	85,39%
13	INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA BARAT	337.078.000	322.525.845	95,68%
B	TUGAS PEMBANTUAN	103.408.899.000	89.466.324.665	86,52%
1	DINAS PERKEBUNAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SUMATERA BARAT	41.347.138.000	40.913.208.607	98,95%
2	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI SUMATERA BARAT	29.336.464.000	17.179.725.020	58,56%
3	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT	912.014.000	391.667.536	42,95%
4	DINAS BINA MARGA CIPTA KAYA DAN TATA RUANG PROVINSI SUMATERA BARAT	10.342.204.000	10.207.312.163	98,70%

5	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI PROVINSI SUMATERA BARAT	20.727.549.000	20.040.759.888	96,69%
6	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SUMATERA BARAT	743.530.000	733.651.451	98,67%
C	TUGAS PEMBANTUAN KAB/KOTA	7.147.011.000	7.058.636.127	98,76%
1	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN AGAM	2.707.357.000	2.697.808.565	99,65%
2	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SIJUNJUNG	892.801.000	874.129.000	97,91%
3	DINAS PERDAGANGAN KOTA PADANG	3.546.853.000	3.486.698.562	98,30%
	TOTAL	168.173.870.000	145.805.535.065	86,70%

Data pada tabel 3.2.5 yang menyampaikan data realisasi keuangan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Sumatera Barat Tahun 2022 sebesar 86,70% yang artinya rendah dari target pada Indikator Kinerja Program sebesar 91% hal ini disebabkan ada beberapa kebijakan dari pusat yang merelokasi anggaran dan penggantian pejabat kementerian/lembaga sehingga mempengaruhi pada saat penyaluran anggaran mulai bulan Mei sampai dengan Oktober 2022 khususnya di bidang kesehatan.

Pada Tahun Anggaran 2022 Biro Administrasi Pembangunan telah memfasilitasi beberapa kali rapat permasalahan dan percepatan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBN yang melibatkan Pemerintah Kabupaten/Kota, Kementerian/Lembaga melalui Satuan Kerja yang berada di Sumatera Barat, baik pelaksanaan pekerjaan infrastruktur hingga kegiatan ketertiban masyarakat.

Dari ke 2 (dua) Sub Kegiatan tersebut di Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah lebih banyak melakukan monitoring dan evaluasi ke daerah dan melakukan rapat-rapat sebagai evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat Persentase OPD dalam melaksanakan kegiatan serta

ketepatan waktu dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan yang tercantum pada Perjanjian Kinerja.

Adapun rincian realisasi Anggaran Kegiatan 2022 untuk Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah sebagai berikut :

Tabel. 3.2.6

Anggaran Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah

II	KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Rp. 2.203.583.000,-	Rp. 2.178.550.060,-	98,83
1	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Rp. 1.355.758.500,-	Rp. 1.342.211.286,-	98,94
1.a	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Rp. 329.785.000,-	Rp. 322.658.655,-	97,84
2.b	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Rp. 319.295.500,-	Rp. 318.537.363,-	99,51

Berdasarkan tabel 3.2.6 bahwa realisasi keuangan pada sub kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD sebesar 97,84 dan sub kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN sebesar 99,51%. Dapat disimpulkan bahwa capaian realisasi keuangan melebihi target dari yang ditetapkan 91% pada indikator kinerja program.

II. BAGIAN PENGENDALIAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH

Dalam pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan Kepala Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah berpedoman kepada Perjanjian Kinerja Kepala Bagian dengan Kepala Biro dengan sasaran dan indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel. 3.2.7
Perjanjian Kinerja Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan
Pembangunan Wilayah

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya ketepatan waktu pelaksanaan pembangunan	Persentase Kabupaten/Kota yang pelaksanaan kegiatan tepat waktu	91%
2.	Optimalnya tertib administrasi pembangunan	Tingkat kesesuaian administrasi pelaksanaan kegiatan dengan standar pada Kabupaten/Kota	91%
3.	Optimalisasi pengendalian pembangunan	Persentase rekomendasi yang diberikan terhadap permasalahan administrasi pembangunan Kabupaten/Kota	91%
4.	Meningkatnya pengawasan organisasi	Berkurangnya pemeriksaan temuan terhadap organisasi	10%

Pelaksanaan kegiatan pada Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah juga memiliki Indikator Kinerja Program yang sama yaitu :

“ Persentase Realisasi Fisik dan Keuangan APBD yang dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota dengan target 91% “

Adapun realisasi fisik dan keuangan APBD Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel 3.2.8 berikut :

Tabel 3.2.8

REKAPITULASI
LAPORAN REALISASI APBD KAB/KOTA SE SUMBAR
TAHUN ANGGARAN 2022
KEADAAN S.D 31 DESEMBER 2022

NO	KABUPATEN / KOTA	TOTAL PAGU (Rp)	REALISASI		KET
			RISIK	KEUANGAN Rp.	
KOTA					
1	PADANG	2,432,047,873,684	98.55	2,224,649,868,849	91.47
2	BUKITTINGGI	837,145,281,505	96.26	744,071,869,350	88.88
3	SOLOK	654,597,785,995	98.11	577,522,797,898	88.23
4	PADANG PANJANG	616,638,674,470	98.10	545,209,090,061	88.42
5	PAYAKUMBUH	752,356,007,312	98.76	695,915,964,175	92.50
6	PARIAMAN	641,914,693,376	96.95	606,442,560,334	94.47
7	SAWAHLUNTO	682,809,902,738	94.47	643,318,214,625	94.22
KABUPATEN					
8	PADANG PARIAMAN	1,407,999,184,315	95.10	1,313,870,894,825	93.31
9	PASAMAN	1,154,361,957,407	96.59	1,004,981,080,172	87.06
10	PASAMAN BARAT	1,300,488,596,612	91.36	1,136,117,674,097	87.36
11	SIJUNJUNG	1,167,312,419,936	86.04	947,123,623,605	81.14
12	DHARMASRAYA	988,684,628,840	95.66	939,153,549,946	94.99
13	SOLOK	1,322,562,690,203	98.06	1,233,491,569,482	93.27
14	SOLOK SELATAN	962,869,500,804	93.60	897,247,350,747	93.18
15	50 KOTA	1,335,440,101,346	98.25	1,230,594,730,098	92.15
16	TANAH DATAR	1,288,136,563,234	98.88	1,186,934,494,819	92.14
17	AGAM	1,543,243,533,214	73.37	1,437,286,315,520	93.13
18	KEP. MENTAWAI	902,742,047,968	86.13	738,296,259,857	81.78
19	PESISIR SELATAN	1,763,605,092,125	96.55	1,629,156,880,488	92.38
	JUMLAH	21,754,956,535,084	94.25	19,731,384,788,947	90.70

Tabel 3.2.8 menampilkan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Kabupaten/Kota kondisi sampai dengan 31 Desember 2022. Realisasi fisik 94,25% berarti melebihi dari target Indikator Kinerja Program yaitu 91%. Realisasi keuangan sebesar 90,70% berarti berada sedikit di bawah target sebesar 91%. Hal ini disebabkan keterlambatan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan yang dananya dari DAK.

Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah untuk tahun 2022 melaksanakan 1 (satu) buah Sub Kegiatan yaitu :

1. Pengendalian Adminitrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah dengan melaksanakan beberapa rangkaian kegiatan :
 - Pelaksanaan Koordinasi;
 - Pelaksanaan Koordinasi Realisasi APBD dan APBN Kab/Kota ;
 - Pelaksanaan monitoring dan evaluasi.
 - Rapat Evaluasi.
 - Rapat Pengendalian dan Monev BKK.
2. Menyikapi pentingnya Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (LRFK) kabupaten/kota, maka melalui Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah, dipersiapkanlah beberapa langkah kerja dan target kinerja yang terukur, yakni :
 - a. Mengadakan pertemuan awal dengan Kabupaten Kota
 - b. Meminta dan merekap LRFK pada 19 (Sembilan Belas) Kabupaten Kota
 - c. Menyampaikan data LRFK tiap bulan kepada Gubernur, Bupati dan Walikota
 - d. Mengadakan Rapat Koordinasi dengan Bappeda, BPKAD dan Bagian Administrasi Pembangunan Kabupaten Kota secara rutin.
 - e. Mengadakan Rapat Evaluasi Kabupaten Kota.

Berdasarkan uraian diatas tahun 2022 anggaran APBD yang pada kegiatan PAPPW sebesar **Rp. 706.678.000,-** dengan realisasi sampai dengan akhir tahun 2022 **Rp. 701.015.268,-** dan sisa **Rp.**

5.662.732,- oleh sebab itu capaian kinerja dari target 91% sudah bisa dikatakan tercapai dengan hasil realisasi persentase sebesar **99,20 %**.

Dari Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah lebih banyak melakukan monitoring dan evaluasi ke Kabupaten/Kota dan melakukan rapat-rapat sebagai evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota dengan tujuan dapat mengetahui tingkat Persentase dalam melaksanakan kegiatan serta ketepatan waktu dalam menyelesaikan pekerjaan seusai dengan yang tercantum pada Perjanjian Kinerja.

Adapun realisasi anggaran Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah sebagai berikut :

Tabel. 3.2.9

Anggaran Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
	KEBIJAKAN PEMBANGUNAN ADMINISTRASI			
1	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Rp. 705.678.000,-	Rp. 701.015.268,-	99,20

Dari tabel 3.2.9 dapat disimpulkan realisasi keuangan sub kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah mencapai 99,20% dengan arti melebihi target 91% berdasarkan indikator kinerja program.

III. BAGIAN PELAPORAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

Kepala Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan mempunyai Perjanjian Kinerja dengan Kepala Biro sebagai berikut :

Tabel. 3.2.10
Perjanjian Kinerja Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Ketepatan Waktu Pelaksanaan Pembangunan	Persentase OPD yang melaksanakan kegiatan tepat waktu	91%
2.	Optimalnya tertib Administrasi Pembangunan	Tingkat kesesuaian administrasi pelaksanaan kegiatan dengan standar pada Perangkat Daerah	91%
3.	Optimalisasi pengendalian pembangunan	Persentase rekomendasi yang berikan saran terhadap permasalahan administrasi pembangunan	91%
4.	Meningkatnya pengawasan internal organisasi	Berkurangnya temuan pemeriksaan terhadap organisasi	10%

Dari Perjanjian Kinerja untuk Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan mempunyai Indikator Kinerja Program “ **Kebijakan Administrasi Pembangunan Yang Dihasilkan dengan target 2 kebijakan** “

Untuk pelaksanaan kegiatan tahun 2022 Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan melaksanakan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Analis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah
 - a. Koordinasi pelaksanaan kegiatan analisis capaian kinerja pembangunan daerah. Pelaksanaan koordinasi kegiatan semula direncanakan melalui pertemuan atau kunjungan ke UPTB yang ada di Kab/Kota dan ke Pemerintah Pusat untuk koordinasi dan konsultasi Dirjen Bangda Kementerian Dalam Negeri.
 - b. Monitoring, Evaluasi, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Daerah di Bidang Analisis Capaian Pembangunan

Daerah. Kegiatan ini dilakukan melalui aplikasi Simbangda based evidence yang dilakukan secara rutin oleh helpdesk dan admin Simbangda dan hasilnya berupa rekapitulasi realisasi fisik dan keuangan SKPD setiap akhir bulan.

- c. Rapat Koordinasi Capaian Kinerja Pembangunan Daerah. Pada tahun 2022 dilakukan rapat koordinasi bersama SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan sistem rapat sesuai lingkup per asisten.
- 2. Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
 - a. Melaksanakan rapat persiapan dengan materi pengarahan, penyamaan persepsi dan pembagian tugas terkait dengan pelaksanaan kegiatan.
 - b. Menyusun dan menerbitkan SK Tim Pelaksana Pelaporan Pembangunan tahun 2022;
 - c. Melakukan inventarisasi terhadap kegiatan / pekerjaan yang dilaksanakan oleh seluruh SKPD lingkup Provinsi Sumatera Barat dan mengelompokkannya atas beberapa kriteria.
 - d. Menyampaikan tatanan pelaksanaan pembangunan dengan menggunakan instrumen monev, peraturan gubernur, serta surat edaran gubernur.
 - e. Melaksanakan fasilitasi dan bimbingan teknis serta rapat tindak lanjut permasalahan bersama SKPD terkait serta unsur terkait lainnya.
 - f. Menyusun laporan realisasi fisik dan keuangan / kemajuan pekerjaan SKPD setiap bulannya dan atau triwulan.
 - g. Melaksanakan rapat evaluasi secara berkala (triwulan) bersama SKPD, Asisten, Sekda dan Gubernur/Wakil Gubernur
 - h. Melaksanakan rapat dalam rangka penyelesaian permasalahan pelaksanaan kegiatan SKPD bersama Tim yang telah ditetapkan.
 - i. Menyusun dan menyampaikan laporan secara berkala.

3. Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah
 - a. Menyusun dan menyiapkan bahan dalam rangka Penyusunan Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisis Standar Belanja Provinsi Sumatera Barat;
 - b. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan Rancangan Peraturan Gubenur tentang HSPK dan ASB
 - c. Memfasilitasi pemanfaatan HSPK dan ASB oleh Perangkat Daerah
 - d. Menyiapkan rencana pengembangan SDM
 - e. Menyiapkan rencana monitoring dan evaluasi
 - f. Menyusun Laporan

Pelaksanaan pekerjaan HSPK dan ASB tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Biro yang merupakan tugas tambahan diberikan oleh pimpinan kepada Biro Administrasi Pembangunan.

Dari ke 3 (tiga) Sub Kegiatan pada Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan melaksanakan Perjanjian Kinerja yang bertujuan terlaksananya ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen yang harus dipenuhi oleh Perangkat Daerah dan Kabupaten/Kota dalam menggunakan anggaran baik yang bersumber dari APBD dan APBN.

Realisasi anggaran kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 3.2.11

Anggaran Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan

2	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Rp. 847.824.500,-	Rp. 836.338.774,-	98,65
2.a	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Rp. 105.820.500,-	Rp. 104.565.827,-	98,81
2.b	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Rp. 482.835.000,-	Rp. 479.966.155,-	99,41
2.c	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Rp. 259.169.000,-	Rp. 251.806.792,-	97,16

Dari tabel 3.2.11 merupakan capaian realisasi keuangan terhadap pelaksanaan kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah yaitu **98,65%** yang mana target realisasi keuangan sebesar 91%.

Sedangkan untuk kebijakan yang dihasilkan hanya 1 buah yang

terealisasi sehingga tidak memenuhi target pada indikator kinerja program sebesar 2 buah kebijakan.

Terhadap pelaksanaan 2 (dua) kegiatan 6 (enam) sub kegiatan oleh 3 (tiga) Bagian pada Biro Administrasi Pembangunan dapat dilakukan pengukuran sebagai hasil kinerja sebagai berikut ini pada tabel 3.2.12:

Tabel 3.2.12
Hasil Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Penetapan Kinerja
Tahun 2022

NO.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Pencapaian Sasaran Pembangunan	Mewujudkan Pengendalian Pembangunan Yang Optimal	Persentase Perangkat Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota Yang Tertib Administrasi Pelaksanaan Pembangunan	91 91	PD : 98,26 Kab/Kota :100	107,98 109,89
2.	Meningkatnya Organisasi yang Akuntabel dan Melayani	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B (61)	60,08	98,49
3.	Meningkatnya Organisasi yang Akuntabel dan Melayani	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	Baik (80)	Baik (88,23)	110,28
<i>Jumlah Capaian</i>						426,64
<i>Rata-rata capaian indikator kinerja</i>						106,66

Pada tabel 3.2.12 diatas dapat dilihat bahwa target indikator kinerja terhadap 3 (tiga) sasaran strategis biro telah diperoleh realisasi dengan jumlah capaian indikator kinerja sebesar 426,64% dengan rata-rata capaian indikator kinerja 106,66%. Selanjutnya rincian capaian kinerja terdiri dari Persentase Perangkat Daerah (OPD Provinsi) yang tertib administrasi pelaksanaan pembangunan dengan capaian kinerjanya sebesar 107,98%. Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota yang tertib administrasi pelaksanaan pembangunan dengan capaian kinerjanya sebesarnya 109.89%. Nilai akuntabilitas kinerja sebesar 99,67% dan Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi sebesar 106,25%

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bawah capaian kinerja untuk sasaran I diukur dengan formula sebagai berikut ini :

$$\frac{\text{Jumlah realisasi seluruh sasaran pendukung} \times 100 \%}{\text{Jumlah target}}$$

3.3 CAPAIAN KINERJA

Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1

Mewujudkan Pengendalian Pembangunan yang Optimal

Berdasarkan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2022 bahwa hasil pelaksanaan kegiatan yang berdasarkan Perjanjian Kinerja Kepala Bagian dirangkum menjadi satu pekerjaan yang terpadu pada Aplikasi Simbangda sebagai bahan pengukur dan data akurat dalam rangka mencapai indikator kinerja Biro Administrasi Pembangunan sebagaimana tercantum pada tabel 3.3.1 yang selanjutnya dapat dijelaskan sasaran strategis yang menyajikan analisis capaian indikator kinerja.

Sasaran Strategis Biro Administrasi Pembangunan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi biro yang selanjutnya disesuaikan dengan Perjanjian Kinerja Biro Administrasi Pembangunan dengan memiliki 1 (satu) Sasaran Strategis yaitu “ *Mewujudkan Pengendalian Pembangunan yang Optimal* dengan Indikator Kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.3.1
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
1.	Percentase Perangkat Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota Yang Tertib Administrasi Pelaksanaan Pembangunan	91 91	PD : 98.26 Kab/Kota : 100	107,98 109,89
Rata-Rata capaian indikator kinerja			108,94	

Cat : PD = Perangkat Daerah

Adapun penghitungan capaian realisasi kinerja terhadap indikator kinerja **“ Percentase Perangkata Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota Yang tertib Administrasi Pelaksanaan Pembangunan ”** adalah sebagai berikut :

$$\text{REALISASI TERTIB ADMINISTRASI PERANGKAT DAERAH} = \frac{\text{JUMLAH EVIDENCE DISETUJUI}}{\text{JUMLAH EVIDENCE YANG DI UPLOAD}} \times 100\%$$

$$98.26 \% = \frac{32.824}{33.404} \times 100\%$$

$$\text{REALISASI TERTIB ADMINISTASI KAB/KOTA} = \frac{\text{JUMLAH KAB/KOTA PENYAMPAIAN LAPORAN FISIK DAN KEU}}{\text{JUMLAH SELURUH KAB/KOTA}} \times 100\%$$

$$100 \% = \frac{19 \text{ kab/kota}}{19 \text{ kab/kota}} \times 100\%$$

- a. Indikator kinerja Perentase Perangkat Daerah Yang Tertib Administrasi Pelaksanaan Pembangunan dapat dilakukan dengan beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh Perangkat Daerah (OPD Provinsi Sumatera Barat) sebagai berikut :
 - i. Upload Data Perencanaan yang terdiri dari : KAK, RUP, HPS, Rapat-rapat persiapan awal kegiatan.
 - ii. Upload Data Pelaksanaan yang terdiri dari : Kontrak, SK Tim, Dokumen lelang, dokumentasi pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan, rapat-rapat pelaksanaan kegiatan

- iii. Upload Data Pelaporan yang terdiri dari : laporan serah terima kegiatan, Laporan Akhir masing-masing sub kegiatan
- iv. Ketepatan waktu masing-masing OPD melaksanakan upload evidence pada aplikasi Simbangda (paling lambat setiap tanggal 10 bulan berikutnya).

Berdasarkan Indikator Kinerja tersebut diatas bahwa capaian kinerja terhadap rata-rata capaian indikator kinerja sebesar 108,94% yang rinciannya terdiri dari Persentase Perangkat Daerah (OPD Provinsi) yang tertib administrasi pelaksanaan pembangunan capaian kinerjanya sebesar 107,98%. Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota yang tertib administrasi pelaksanaan pembangunan capaian kinerjanya sebesarnya 109,89%.

Dari ke 3 (tiga) data yang di upload tersebut akan menjadi evidence dari masing-masing sub kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing OPD Provinsi. Data evidence yang telah dilaksanakan sampai kondisi 10 Januari 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.3.2
Statistika evidence
Januari sampai Desember
Tahun 2022

No	SKPD	Helpdesk	Total paket	Total evidence di upload	Total evidence belum di periksa		Total evidence di setujui	Total evidence di tolak
					Swakelola	Penyedia		
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Yoval Eka Putra, SH	84	509	0	0	509	0
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Elfendrizal	67	358	0	0	358	0
3	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Rahmi Dewi, ST, MM	103	296	8	26	262	0
4	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Yoval Eka Putra, SH	71	181	0	0	181	0
5	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Lisma Oktavia, SE, M.Si	39	137	0	0	137	0
6	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Yoval Eka Putra, SH	104	269	0	0	264	5
7	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (PPKD)	Yoval Eka Putra, SH	3	28	0	0	28	0
8	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Yoval Eka Putra, SH	52	193	0	0	193	0
9	BADAN PENGHUBUNG	Yoval Eka Putra, SH	49	93	0	0	93	0
10	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Niswen, A.Md	144	1048	0	0	1048	0
11	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	NOVITA RIDHA, S.STP	42	209	0	0	209	0
12	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	DELVI SUKRI	56	67	0	0	67	0
13	BIRO HUKUM	M IKHSAN NOVANDI, S.STP, M.Si	35	115	0	0	115	0
14	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	Elfendrizal	36	111	0	0	110	1
15	BIRO ORGANISASI	Niswen, A.Md	23	49	0	0	49	0
16	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Rahmi Dewi, ST, MM	61	249	0	0	248	1
17	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	Akmal Rusli, SE	50	182	0	0	166	16
18	BIRO PEREKONOMIAN	NOVITA RIDHA, S.STP	49	285	0	0	285	0
19	BIRO UMUM	Yoval Eka Putra, SH	223	246	0	0	245	1
20	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	FEBI FORTUNA, S.STP	340	2335	0	0	2334	1
21	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	FEBI FORTUNA, S.STP	65	311	0	0	311	0
22	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	Laura Nurwinda	74	411	0	0	411	0
23	DINAS KEBUDAYAAN	Eko Wisa	79	344	0	0	344	0
24	DINAS KEHUTANAN	Rinaldi Saputra	470	2837	209	152	2475	1
25	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	Ratna Dewi, S.Sos	255	1123	3	14	1105	1
26	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Yoval Eka Putra, SH	83	359	0	0	359	0
27	DINAS KESEHATAN	Rahmi Dewi, ST, MM	181	907	8	19	867	13
28	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	DELVI SUKRI	151	1040	7	7	1020	6
29	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	NOVITA RIDHA, S.STP	71	452	0	0	452	0
30	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Ratna Dewi, S.Sos	108	626	0	0	626	0

31	DINAS PANGAN	Akmal Rusli, SE	93	356	0	0	354	2
32	DINAS PARIWISATA	Elfendrizal	80	369	0	0	369	0
33	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Rahmi Dewi , ST, MM	49	204	0	0	203	1
34	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	DELVI SUKRI	68	413	0	0	413	0
35	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	M IKHSAN NOVIANDI, S.STP, M.Si	135	634	0	0	634	0
36	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Rinaldi Saputra	58	270	0	0	270	0
37	DINAS PENDIDIKAN	MUHAMMAD FAJRI ZALMI, S.STP, M.Si	1762	4745	8	19	4696	22
38	DINAS PERHUBUNGAN	Akmal Rusli, SE	77	422	0	0	422	0
39	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	SYUKRI PITER NUGRAHA, S.STP, M.I.Kom	167	872	0	0	872	0
40	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	Rinaldi Saputra	456	1097	0	0	1095	0
41	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	SYUKRI PITER NUGRAHA, S.STP, M.I.Kom	1076	3923	0	7	3916	0
42	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	SYUKRI PITER NUGRAHA, S.STP, M.I.Kom	128	735	0	0	735	0
43	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	M IKHSAN NOVIANDI, S.STP, M.Si	38	113	0	0	113	0
44	DINAS SOSIAL	Eko Wisa	339	961	0	0	944	17
45	DINAS SUMBAR DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	FEBI FORTUNA, S.STP	268	1467	0	0	1466	1
46	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Rinaldi Saputra	67	334	0	0	334	0
47	INSPEKTORAT	Yoval Eka Putra, SH	51	156	0	0	156	0
48	RUMAH SAKIT JIWA PROF. HB. SAANIN	SYAHRIAL MUIS	28	157	0	0	157	0
49	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGI	SYAHRIAL MUIS	24	173	0	0	173	0
50	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR	SYAHRIAL MUIS	14	118	1	0	117	0
51	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN	SYAHRIAL MUIS	15	130	0	0	130	0
52	SEKRETARIAT DPRD	Lisma Oktavia, SE, M.Si	84	385	0	0	384	1
Total			8245	33404	244	244	32824	90

Hasil akhir dari penginputan data evidence pada aplikasi Simbaga akan dapat menghasilkan capaian realisasi fisik dan keuangan setiap pelaksanaan sub kegiatan oleh masing-masing OPD seperti tabel berikut ini :

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
APBD PERUBAHAN Tahun 2022

Laporan Rekap Realisasi Fisik Dan Keuangan Per SKPD
kondisi realisasi sampai 31 Desember 2022

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	Fisik				Keuangan				Fisik				Keuangan				ASISTEN ADMINISTRASI UMUM				Fisik				Keuangan						
	T		R		D		T		R		D		T		R		D		T		R		D		T		R		D		
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	100.00	98.38	-1.62	100.00	96.38	-3.62	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	100.00	100.00	0.00	99.81	93.01	-0.80	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	100.00	100.00	0.00	100.00	97.74	-2.26											
BADAN PENANGGUHLAN BENCAWA DAERAH	100.00	93.26	-6.74	100.00	94.78	-5.22	BIRO PENGAJUAN BARANG DAN JASA	100.00	98.32	-1.68	100.00	98.17	-1.83	BADAN PENDAPATAN DAERAH	100.00	100.00	0.00	100.00	94.95	-5.05											
BIRO HUKUM	96.97	99.75	2.78	100.00	81.03	18.97	BIRO PEREKONOMIAN	100.00	100.00	0.00	100.00	95.35	-3.05	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	94.87	95.51	0.64	100.09	95.12	-4.97											
BIRO KESAJAHAN RAKYAT	100.00	95.89	-4.11	100.00	91.58	-8.42	DIKES BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	100.00	96.09	-3.91	100.00	94.69	-5.31	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	100.00	84.10	-15.90	100.00	82.34	-17.66											
BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	100.00	97.71	-2.29	100.00	98.09	-1.91	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	100.00	99.22	-0.78	100.00	95.85	-4.15	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (PPKD)	100.00	98.23	-1.77	100.00	98.65	-1.35											
DISNA KEBUDAYAAN	100.00	100.00	0.00	99.64	96.28	-3.36	DINAS KEBHUTANAN	100.00	82.80	-12.20	99.92	91.95	-7.97	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	98.46	89.25	-9.21	100.00	88.14	-11.86	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	100.00	100.00	0.00	100.00	96.72	-3.28				
DINAS KEPENDIDUKAN DAN PENCATATAN SPTIL	100.00	100.00	0.00	100.00	98.35	-1.65	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	94.12	97.76	3.64	86.22	91.23	5.01	BADAN PERHUSUNS	100.00	99.55	-0.45	100.00	93.22	-6.78											
DINAS KESIHATAN	94.83	90.32	-4.53	99.87	90.22	-9.65	DIMAS LINGKUNGAN HIDUP	100.00	100.00	0.00	97.77	96.69	-0.88	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	100.00	100.00	0.00	100.00	99.23	-0.77											
DINAS PEMERDIDAYAN MASYARAKAT DAN DESA	100.00	96.93	-1.31	100.16	97.92	-2.24	DINAS PARIAGAN	96.83	96.67	-0.16	100.00	95.11	-4.89	BIRO ADMINISTRASI PEMERINTAH	100.00	100.00	0.00	100.00	97.18	-2.82											
DINAS PEMERDIDAYAN, PERENCANAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDIDIK DAN KELUARGA BERENCANA	100.00	100.00	0.00	96.22	95.84	-0.38	DINAS PARINASATA	100.00	100.00	0.00	100.00	94.42	-5.58	BIRO ORGANISASI	100.00	99.95	-0.95	100.00	97.17	-2.83											
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	100.00	99.96	-0.04	100.00	93.20	-6.80	DINAS PERHUBUNGAN	100.00	100.00	0.00	100.00	96.83	-3.17	BIRO LHM	100.00	100.00	0.00	100.00	96.09	-3.92											
DINAS PERDIDIKAN	100.00	87.34	-12.96	100.00	95.93	-4.07	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDIDUGAN	100.00	99.51	-0.49	100.00	93.57	-6.43	DIMAS TERSPAN DAN PERDUSTAKAAN	100.00	99.14	-0.86	100.00	93.28	-6.72											
DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRaja	100.00	99.96	0.14	100.00	98.09	-1.91	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	99.37	78.14	-21.23	100.00	65.25	-39.75	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	100.00	96.14	-3.86	100.00	93.30	-6.70											
DINAS SOSIAL	100.00	93.02	-6.98	100.00	97.46	-2.54	DINAS TERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	100.00	91.39	-8.61	100.00	93.87	-4.13	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	100.00	98.58	-1.42	100.00	96.56	-3.53											
RUMAH SAKIT IMA PROF. H.B. SANIN	100.00	98.33	-1.67	100.00	96.46	-3.54	DINAS TERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	100.00	90.90	90.75	-9.25	100.00	82.31	-17.69	INSPEKTORAT	100.00	100.00	0.00	100.00	98.17	-1.83										
RUMAH SAKIT UHUM DAERAH DR. ACHMAD MOCHtar BUKITINGI	100.00	99.17	-0.83	100.00	70.23	-29.77	DINAS LUMBAR DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	100.00	83.71	-16.29	100.02	98.43	-1.59	SEKRETARIAT DPRD	100.00	96.37	-3.63	100.00	93.85	-5.15											
RUMAH SAKIT UHUM DAERAH FARJUMAN	100.00	97.75	2.25	100.00	98.54	-1.46	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSIMigrasi	99.80	98.00	-1.80	100.00	95.47	-4.53	Rata - rata	99.68	97.92	-1.76	100.00	97.27	-2.73											
Rata - rata	99.54	97.17	-2.37	99.97	94.39	-5.58	Rata - rata	99.37	94.53	-4.84	99.68	88.43	-11.25																		

Statistik Data Deviasi SKPD:

Keterangan	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA				ASISTEN PEMERINTAHAN DAN PENBARUNAN				ASISTEN ADMINISTRASI UMUM				Total				Fisik				Keuangan								
	Fisik		Keuangan		Fisik		Keuangan		Fisik		Keuangan		T		R		D		T		R		D						
Deviasi Diatas 10%	1	2	3	4	5	6																							
Deviasi Antara 5% sampai 10%	2	12	11	15	10	13																							
Deviasi Diawah -5%	15	12	12	11	15	10																							
Total Data	18		18		16																							52	

Keterangan:
T : Target
R : Realasi
D : Deviasi
1 : Deviasi diatas 10%
2 : Deviasi antara 5% sampai 10%
3 : Deviasi diawah -5%

Pengcapaih / Rata Rata Pemprov Sumbar:

	Fisik	Keuangan
	99.52	96.49

b. Indikator kinerja Persentase Kabupaten/Kota Yang Tertib Administrasi Pelaksanaan Pembangunan dapat dilakukan oleh Kabupaten/Kota dengan ketepatan waktu penyampaian laporan realisasi fisik dan keuangan oleh masing-masing Kabupaten/Kota ke Biro Administrasi Pembangunan yang dilakukan paling lambat setiap tanggal 10 bulan berikutnya. Tahun 2022 ini Biro Administrasi Pembangunan baru bisa melakukan “**Tertib Administrasi Pelaksanaan Pembangunan berdasarkan Tepat Waktu Dalam Penyampaian Administrasi Pembangunan oleh Kabupaten/Kota Ke Biro Administrasi Pembangunan**”. Kondisi tersebut disebabkan karena aplikasi Simbangda saat ini masih tahap pengenalan dan replikasi di Kabupaten/Kota, jadi belum bisa dilakukan seperti kondisi di Provinsi. Tertib administrasi pelaksanaan pembangunan yang disampaikan oleh Kabupaten/Kota dilihat dari ketepatan waktu penyampaian laporan ke Provinsi setiap bulannya paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dari pelaksanaan kegiatan.

Tabel 3.3.3 menampilkan perbandingan target dan realisasi Capaian kinerja Tahun 2021 dan 2022

Tabel 3.3.3

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2021 dan 2022

No.	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Renstra	Target		Realisasi		Capaian (%)		Ket
			2021	2022	2021	2022	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Percentase Perangkat Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota Yang Tertib Administrasi Pelaksanaan Pembangunan	NA	90	91	PD : 98,29 Kab/Kota : 100	PD : 98,26 Kab/Kota : 100	109,21 111,11	107,98 109,89	
Jumlah Capaian							220.32	217.87	
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja							110.16	108.94	
Kriteria Penilaian							Sangat Baik		

*Tidak ada target kinerja nasional yang diamanatkan.

Hasil capaian indikator kinerja Tahun 2022 mencapai 108,94% mengalami sedikit penurunan dari pada tahun 2021 mencapai 110,16%, hal ini disebabkan karena pada tahun 2022 terdapat beberapa keterlambatan capaian proses tertib administrasi akibat dari peralihan sistem perlaporan berbasis eviden pada Kabupaten/Kota yang melaksanakan replikasi.

Sebagai penunjang kegiatan Biro Admininstrasi Pembangunan didukung dengan anggaran sebagai berikut :

Tabel 3.3.4
Realisasi Anggaran Program Administrasi Pembangunan Tahun 2022

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
	KEBIJAKAN PEMBANGUNAN	ADMINISTRASI	Rp. 2.203.583.00,-	98,83
I	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Rp. 1.355.758.500,-	Rp. 1.341.416.286,-	98,94
1	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Rp. 329.785.000,-	Rp. 322.658.655,-	97,84
2	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Rp. 319.295.500,-	Rp. 317.742.363,-	99,51
3	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Rp. 705.678.000,-	Rp. 701.015.268,-	99,20
II	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Rp. 847.824.500,-	Rp. 836.338.774,-	98,65
1	Analis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Rp. 105.820.500,-	Rp. 104.565.827,-	98,81
2	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Rp. 482.835.000,-	Rp. 479.966.155,-	99,41
3	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Rp. 259.169.000,-	Rp. 251.806.792,-	97,51

Dari tabel 3.3.4 secara keseluruhan Program Administrasi Pembangunan realisasi keuangannya 98,83% dengan artian melebihi dari target keuangan indikator program 91% serta dengan realisasi fisiknya 100%.

Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2

MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI

Keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat menjadi pondasi penting di dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah yang tentunya dapat memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan pembangunan nasional, dengan kata lain bahwa keberhasilan pembangunan nasional ditentukan oleh keberhasilan dari pelaksanaan pembangunan daerah secara menyeluruh dan utuh.

Kemampuan Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas dan kewenangan memiliki makna yang antara lain ditandai dengan

kemampuan melakukan pengelolaan Pemerintah Daerah secara professional dan handal serta memiliki daya inovasi dan kreasi yang tinggi di dalam meningkatkan manajemen pemerintahan.

Sehubungan dengan keberhasilan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Biro Administrasi Pembangunan dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya telah melakukan suatu perencanaan yang terangkum dalam suatu perencanaan strategis yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat 2021-2026. Salah satu upaya yang dilakukan adalah membuat suatu sasaran strategis yang berkaitan kepada Tata Kelola Organisasi.

Tata kelola organisasi pemerintah daerah berdasarkan reformasi birokrasi diarahkan untuk menciptakan organisasi perangkat daerah yang efisien, efektif, rasional dan proposisional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah serta pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan implementasi serta adanya komunikasi antar kelembagaan dengan indikator :

1. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Biro Administrasi Pembangunan berdasarkan kepada evaluasi laporan kinerja tahun 2021 terhadap pemakaian anggaran tahun 2021, Biro Administrasi Pembangunan memperoleh nilai 60,08 dengan kategori B dengan pengertian Baik, dimana akuntabilitas kinerja sudah baik, memiliki system yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja dan perlu sedikit perbaikan. Untuk tahun 2022 Biro Administrasi Pembangunan menargetkan B dengan nilai 61 yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.3.5.
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
1.	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	B(61)	B(60,08)	98,49

2. Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022 dari bulan Januari sampai dengan Desember 2022 sesuai dengan perencanaan Biro Administrasi Pembangunan terdapat 2 (dua) program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 23 (dua puluh lima) sub kegiatan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi biro. Jumlah anggaran yang tersedia Rp. 3.338.444.003,- dengan realisasi Rp. 3.304.469.718,- atau dengan besaran persentase realisasi keuangan **98,98%** dan realisasi fisik **100%**.

Selanjutnya kegiatan dan anggaran yang pendukung sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3.6
Realisasi Anggaran Tahun 2022

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
	BELANJA DAERAH	Rp. 3.338.444.003	Rp. 3.304.469.718,-	98,98
1	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Rp. 1.134.861.003,-	Rp. 1.126.714.658,-	99,28
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 37.988.000,-	Rp. 37.927.500,-	99,84
1.a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 21.475.000,-	Rp. 21.433.000,-	99,80
1.b	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 16.513.000,-	Rp. 16.494.500,-	99,89
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 75.285.000,-	Rp. 75.253.000,-	99,96
2.a	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp. 62.225.000,-	Rp. 62.225.000,-	100
2.b	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntasi SKPD	Rp. 13.060.000,-	Rp. 13.028.000,-	99,75
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp. 18.800.000,-	Rp. 18.800.000,-	100
3.a	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp. 18.800.000,-	Rp. 18.800.000,-	100
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 45.339.600,-	Rp. 45.277.900,-	99,86
4.a	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp. 45.339.600,-	Rp. 45.277.900,-	99,86
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 736.531.203,-	Rp. 734.227.384,-	99,69
5.a	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 128.845.910,-	Rp. 128.000.000,-	99,34
5.b	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 39.062.290,-	Rp. 39.062.290,-	100
5.c	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp. 18.369.500,-	Rp. 18.369.500,-	100

5.d	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp. 5.200.000,-	Rp. 4.201.000,-	80,79
5.e	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 545.053.503,-	Rp. 544.594.594,-	99,92
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 35.600.000,-	Rp. 34.890.000,-	98,01
6.a	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Rp. 35.600.000,-	Rp. 34.890.000,-	98,01
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 75.887.850,-	Rp. 72.815.366,-	95,95
7.a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 74.386.350,-	Rp. 72.815.366,-	97,89
7.b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 1.501.500,-	Rp. 0.00,-	0,00
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 109.429.350,-	Rp. 107.523.508,-	98,26
8.a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kenadaraan Dinas Jabatan	Rp. 49.190.000,-	Rp. 47.718.800,-	97,01
8.b	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 47.774.350,-	Rp. 47.339.708,-	99,09
8.c	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 12.465.000,-	Rp. 12.465.000,-	100
II	KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Rp. 2.203.583.000,-	Rp. 2.177.755.060,-	98,83
1	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Rp. 1.355.758.500,-	Rp. 1.341.416.286,-	98,94
1.a	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Rp. 329.785.000,-	Rp. 322.658.655,-	97,84
2.b	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Rp. 319.295.500,-	Rp. 317.742.363,-	99,51
3.c	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Rp. 706.678.000,-	Rp. 701.015.268,-	99,20
2	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Rp. 847.824.500,-	Rp. 836.338.774,-	98,65
2.a	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Rp. 105.820.500,-	Rp. 104.565.827,-	98,81
2.b	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Rp. 482.835.000,-	Rp. 479.966.155,-	99,41
2.c	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Rp. 259.169.000,-	Rp. 251.806.792,-	97,16

Tabel 3.3.7
Perbandingan Target dan Realisasi Sasaran 2
Tahun 2021 dan 2022

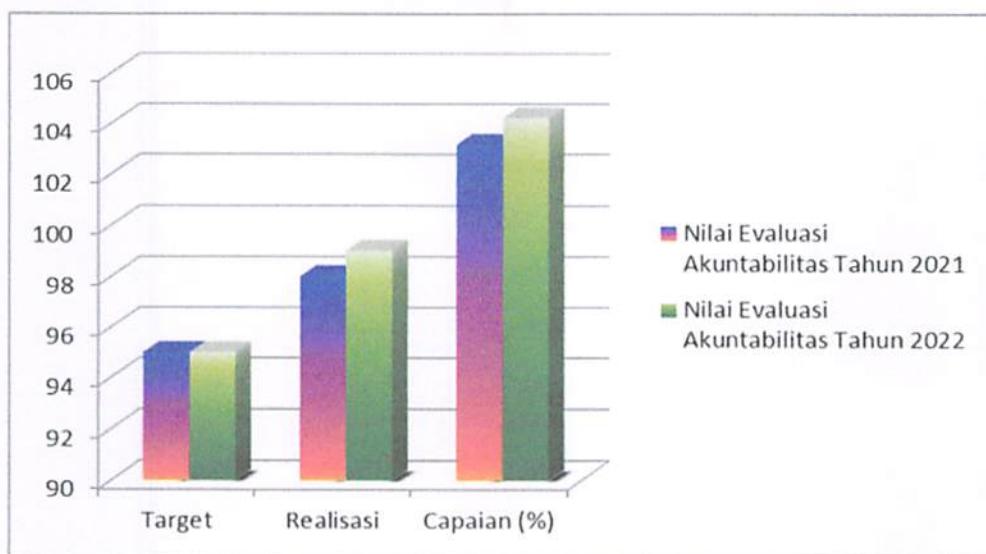
NO.	INDIKATOR KINERJA RENSTRA	KONDISI AWAL RENSTRA	TARGET		REALISASI		CAPAIAN (%)		KET
			2021	2022	2021	2022	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	NILAI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI	NA	95	95	98.01	98.98	103.16	104.19	
RATA-RATA 2021 DAN 2022							103.16	104.19	
KRITERIA PENILAIAN							SANGAT BERHASIL		

Dari tabel 3.3.7 dapat dilihat hasil capaian indikator kinerja sasaran strategis 2 terhadap realisasi tahun 2022 dan tahun 2021, serta dibandingkan antara realisasi dengan target untuk Tahun 2021 dan tahun 2022. Dari tabel di atas diperoleh capaian rata-rata realisasi keuangan tahun 2022 sebesar 104,19 % lebih meningkat dari tahun 2021 dan dapat diartikan bahwa capaian nilai evaluasi akuntabilitas kinerja organisasi lebih dari capaian rata-rata yang 100% dengan kriteria penilaian **Sangat Berhasil**

Dalam mewujudkan capaian target indikator kinerja dengan 2 (dua) sasaran strategis yang menjadi pengukuran capaian kinerja adalah yang tertuang dalam Renstra 2021-2026, dimana tahun 2022 mendapat alokasi anggaran dalam DPA/DPPA Biro Administrasi Pembangunan sebesar Rp. 3.338.444.003,- dengan realisasi Rp. 3.304.469.718 sebagaimana tercantum pada tabel 3.3.7 diatas.

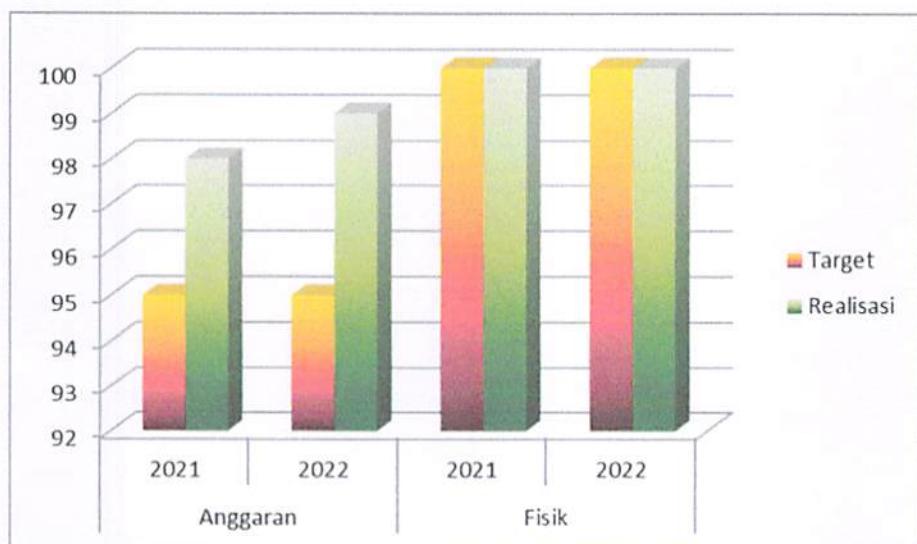
Adapun realisasi fisik dan keuangan dapat dilihat pada grafik 1 (satu) dibawah ini :

Grafik 2
Realisasi Fisik dan Keuangan



Berdasarkan kepada tingkat realisasi fisik dan keuangan dapat dilihat perbandingan realisasi anggaran dan fisik 2021 dan 2022 pada grafik 3 dibawah ini :

Grafik 3
Perbandingan Realisasi Anggaran dan Fisik
Tahun 2021 dan 2022



Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2

MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI

Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3

MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN ORGANISASI

Pengukuran kualitas pelayanan organisasi pada Biro Administrasi Pembangunan dilakukan dengan menyerahkan kuisioner kepada Perangkat Daerah (OPD Provinsi) dan Kabupaten/Kota sebagai OPD yang dilayani oleh Biro Administrasi Pembangunan. Adapun jumlah Kuisioner yang disampaikan berjumlah 10 pertanyaan.

Responden yang diberikan kuisioner dibagikan kepada 50 OPD Provinsi dan 10 Kabupaten/Kota. Dari kuisioner yang diberikan dapat dilakukan rekapitulasi sebagai bahan untuk memperoleh nilai tingkat kepuasan pelayanan yang diberikan Biro. Adapun beberapa unsur yang dipertanyakan pada kuisioner sebagai berikut :

- a. Prosedur pelayanan
- b. Persyaratan dan jenis pelayanan
- c. Kesesuaian persyaratan
- d. Kejelasan informasi
- e. Jumlah personil yang melayani
- f. Sarana pendukung dstnya

Dari unsur pertanyaan yang dijawab pada kuisioner tersebut akan memperoleh hasil respon kuisioner yang akan dipergunakan sebagai indikator kinerja biro. Respon yang menyerahkan kembali lembar kuisioner berjumlah 40 lembar dengan rincian sebagai berikut :

- a. OPD Provinsi 50 kuisioner mengembalikan 30
- b. Kabupaten/Kota 19 kuisioner mengembalikan 10

Sehingga diperoleh rekapitulasi kuisioner yang disebarluaskan sebagai berikut :

Tabel 3.3.8
Tabel Rekapitulasi Kuisioner

NO.	JUMLAH RESPONDEN	NILAI RESPONDEN	JUMLAH NILAI
1	24	44	1,056
2	11	32	352
3	5	29	145
TOTAL NILAI			1,553

Total Nilai Pertanyaan 44 (nilai maksimal) X responden = 1.760

$$\text{NILAI IKM} = \frac{1.553}{1.760} \times 100\% = 88.23$$

Dari perhitungan nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) tersebut dapat dibuat tabel Tingkat kepuasan Pelayanan Organisasi sebagai berikut :

Tabel 3.3.9
Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi

NO.	INDIKATOR KINERJA RENSTRA	KONDISI AWAL RENSTRA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KET
			2022	2022		
1	2	3	5	7	9	10
1	TINGKAT KEPUASAN TERHADAP PELAYANAN ORGANISASI	NA	80	88.23	110.28	
RATA-RATA 2022						110.28
KRITERIA PENILAIAN						SANGAT BAIK

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa hasil capaian tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi dalam hal ini pelayanan yang dilakukan oleh Biro Administrasi Pembangunan bernilai **110,28%** dengan artian **Sangat Baik**.

TABEL 3.3.10
HASIL KUISIONER

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab diatas untuk tahun 2022 Biro Administrasi Pembangunan secara keseluruhan pencapaian kinerja Tahun 2022 dapat disimpulkan berjalan dengan baik sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Sekretariat Daerah 2021-2026. Pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2022 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pencapaian 3 (tiga) sasaran strategis Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 yang diukur berdasarkan rata-rata capaian kinerja terhadap 3 (tiga) indikator kinerja yang pelaksanaannya Bulan Januari s.d Desember 2022 dengan hasil capaian kinerja sebesar **106,66%**
2. Usaha yang dilakukan dalam rangka dalam rangka mewujudkan indikator kinerja terhadap **Persentase Perangkata Daerah Yang tertib Administrasi Pelaksanaan Pembangunan** adalah dengan menerapkan penggunaan aplikasi Simbangda bagi seluruh OPD Provinsi agar dapat terlaksananya tertib administrasi pembangunan yang mana seluruh OPD malakukan tahapan upload dokumen sebagai data dukung dan ketepatan waktu melaksanakan tertib pelaksanaan administrasi pembangunan.
3. Usaha yang dilakukan dalam rangka dalam rangka mewujudkan indikator kinerja terhadap **Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota Yang tertib Administrasi Pelaksanaan Pembangunan** melakukan rapat koordinasi dengan seluruh Kabupaten/Kota untuk dapat menyerahkan laporan pelaksanaan pembangunannya dengan tepat waktu.
4. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 ini merupakan laporan capaian kinerja selama tahun 2022. Dengan kata lain

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini bermaksud untuk menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya pelaksanaan pembangunan yang telah dilakukan dilihat dari tingkat capaian dan target sasaran strategis, selain itu juga mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan serta upaya pemecahan masalah untuk pelaksanaan program dan kegiatan di masa mendatang agar sasaran startegis yang ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan.

4.2 Permasalahan dan Kendala

Pencapaian kinerja untuk tahun 2022 terhadap pelaksanaan kegiatan Biro Administrasi Pembangunan terhadap anggaran yang disesuaikan dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan dapat terlaksana dengan baik. Namun demikian terdapat beberapa permasalahan yang dialami selama tahun 2022 antara lain :

- a. Perlunya memperbarui beberapa peraturan terkait pembangunan di Sumatera Barat seperti peraturan tentang pengadaan barang dan jasa, peraturan tentang pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan lewat tahun anggaran, peraturan tentang proyek strategis/tahun jamak. Sehingga ada kepastian hukum dan pegangan bagi pelaksanaan pekerjaan dilapangan.
- b. Monev yang dilaksanakan hanya menyentuh sebagian kecil dari paket pekerjaan yang ada. Sehingga untuk mengambil kesimpulan dengan sampel yang sedikit itu tentunya kurang valid. Sehingga kedepannya perlu peningkatan jumlah sampel monev yang dilaksanakan dengan tujuan mengurangi faktor kesalahan dalam mengambil kesimpulan masalah-masalah pembangunan.
- c. Kurangnya sarana mobilitas sangat berpengaruh pada pelaksanaan pekerjaan. Idealnya monev yang dilaksanakan selain yang terencana dengan melibatkan SKPD terkait sewaktu-waktu juga perlu dilaksanakan

Sidak. Sehingga dapat dilihat kondisi asli dilapangan seperti apa. Hal ini tentunya harus didukung oleh sarana mobilitas yang ideal dalam pelaksanaannya.

- d. Perlu adanya sinkronisasi dari beberapa OPD dalam pengendalian pelaksanaan sebuah kegiatan baik dalam sisi pelaporan pelaksanaan kegiatan, terutama sinkronisasi data realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan pekerjaan yang bersumber dari dana perimbangan.
- e. Perlu adanya perencanaan yang matang dari OPD dalam melaksanaan kegiatan, terutama OPD yang memiliki sumber dana dari APBD dan APBN agar ada time schedule pelaksanaan kegiatan sehingga tidak terjadi padatnya pelaksanaan kegiatan diakhir tahun anggaran.
- f. Terjadinya gagal lelang, sehingga pemda harus mengulang proses lelang yang pada akhirnya menghambat penyerapan anggaran dan pencapaian output.
- g. Pada momumnya SKPD belum mengentrykan permasalahan dan rencana tindak lanjut di dalam sistem
- h. Data yang dilaporkan pada Aplikasi Simbangda agar update dan valid
- i. Belum optimalnya penyelesaian proses lelang karena adanya review HPS untuk pekerjaan Kontruksi.
- j. Masih adanya keterlambatan DAK yang belum selesai akibat kelalaian dari SKPD sehingga mengakibatkan kerugian pada daerah
- k. Belum lengkapnya dokumen/bukti yang harus diupload kedalam system
- l. Masih adanya kegiatan yang belum terlaksana dan proses tender yang belum keluar izinnya sampai pada batas waktu yang telah ditentukan.
- m. Terkait Adanya Sub Kegiatan baru yang tidak dapat diinput karena OPD belum mengentahui tata cara entry kegiatan tambahan.
- n. Sehubungan adanya perbedaan realisasi fisik dan realisasi keuangan, hal ini dikarenakan adanya perbedaan perhitungan total realisasi antar fisik dan keuangan, dan sudah dilakukan rumusan dengan pemberian

- bobot terhadap realisasi fisik maupun realisasi keuangan, sehingga terdapat keseimbangan terhadap realisasi fisik maupun keuangan.
- o. Terkait adanya OPD yang merubah paket kegiatan menjadi rutin, sehingga perlu dilakukan penguncian terhadap kegiatan tertentu termasuk kegiatan pada program penunjang pemerintah pada anggaran rutin.
 - p. Terkait adanya penyatuan paket kegiatan yang seharusnya tidak disatukan.

Dari masalah yang disampaikan diatas dapat juga memperlambat proses pelaksanaan aplikasi Simbangda pada masing-masing OPD sehingga dapat memperlambat pelaksanaan proses tertib administrasi pembangunan. Karena keterlambatan dalam proses upload data ke aplikasi Simbangda menyebabkan lambatnya semua proses administrasi.

DOKUMENTASI SUB KEGIATAN PENGENDALIAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN APBN TAHUN 2022



Rapat Koordinasi Pengendalian Pembangunan, 30 Agustus 2022 di Balcone Hotel





Rapat Pengendalian kegiatan APBN di Sumatera Barat bersama Satker Kementerian/Lembaga



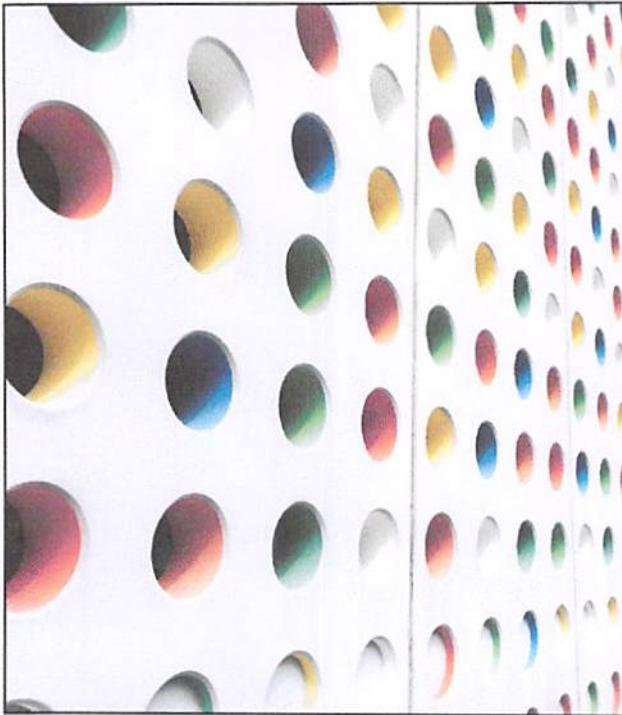


Monev Pelaksanaan Pembangunan APBN di Sumatera Barat Tahun 2022





Rapat Pengendalian DAK Fisik Tahun 2022



Dokumentasi Monev BKK Tahun 2022

18 AGUSTUS S.D
7 SEPTEMBER 2022

Kabupaten Solok Selatan



Pertemuan dengan Sekda dan
Kabag AP Solsel



Pertemuan Tim Monev BKK Provinsi
dengan Wakil Bupati dan Tim Monev
BKK Solsel

Kabupaten Sijunjung



Rapat Evaluasi sekaligus Monev BKK ke Program Strategis Kabupaten Sijunjung

Kota Bukittinggi



Monev Dana BKK Provinsi untuk Kegiatan Pariwisata

Pertemuan dengan Pengelola SMAN 2 terkait dana BKK Pendidikan Kota Bukittinggi

Pertemuan dengan Pengelola SMKN 2 terkait dana BKK Pendidikan Kota Bukittinggi

Kabupaten Lima Puluh Kota



Rapat dengan Tim Monev BKK Kabupaten Lima Puluh Kota



Kunjungan Lapangan dengan Tim Monev BKK Kabupaten Lima Puluh Kota ke Harau



Kunjungan Lapangan dengan Tim Monev BKK Kabupaten Lima Puluh Kota ke Batas Kabupaten dengan Kota Payakumbuh

Kabupaten Pasaman



Rapat dengan Tim Monev BKK Kabupaten Pasaman



Berfoto Bersama dengan Tim Monev BKK Kabupaten Pasaman



Kunjungan ke Kawasan Equator, Pasaman

Kota Solok



Rapat dan Makan Siang Bersama dengan Tim Monev BKK Kota Solok

Kunjungan Lapangan ke Stadion Marahadin Kota Solok

Pertemuan dengan Pelaksana Pembangunan Stadion Marahadin Kota Solok

Kunjungan Lapangan ke Kawasan Wisata Belibis Kota Solok

Kabupaten Solok



Pertemuan dengan Tim Monev BKK Kabupaten Solok

Kunjungan Lapangan ke Kawasan TIC Kabupaten Solok

Kunjungan Lapangan ke Jalan Aripan Kabupaten Solok

Kota Pariaman



Tim Monev Provinsi dan Tim Monev BKK Kota Pariaman di Balaikota Pariaman



Pertemuan antara Tim Monev Provinsi dan Kota Pariaman dengan Pengelola SMKN 2 Pariaman



Tim Monev Provinsi dan Kota Pariaman dengan Pengelola SMAN 5 Pariaman

Kota Sawahlunto



Pertemuan dengan Tim Monev BKK Kota Sawahlunto



Kunjungan Lapangan ke Kawasan Kandih Kota Sawahlunto

Kabupaten Tanah Datar



Pertemuan dengan Tim
Monev BKK Kabupaten
Tanah Datar

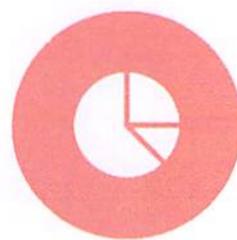


Berfoto bersama dengan Tim
Monev BKK Kabupaten
Tanah Datar



Kunjungan Lapangan ke
Geopark Singkarak di
Kabupaten Tanah Datar

Sekian



TERIMA KASIH

**DOKUMENTASI KEGIATAN PELAPORAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
TAHUN 2022**



II.26. Rekonsiliasi TW III)



II.27. Rekonsiliasi TW IV (APBD
Perubahan)

Dokumentasi Kegiatan Focus Group Discussion (FGD)
Tanggal 13 s.d 14 Juni 2022

